

HUBUNGAN KOREA SELATAN-INDONESIA DI ERA MOON JAE IN

DALAM PERSPEKTIF TEORI KEMITRAAN STRATEGIS

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

GUSTI SYIFA NABILAH

21323198

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**HUBUNGAN KOREA SELATAN-INDONESIA DI ERA MOON JAE IN
DALAM PERSPEKTIF TEORI KEMITRAAN STRATEGIS**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

GUSTI SYIFA NABILAH

21323198

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN
HUBUNGAN KOREA SELATAN-INDONESIA DI ERA MOON JAE IN
DALAM PERSPEKTIF TEORI KEMITRAAN STRATEGIS

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

11 Juli 2025



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P. M.Sc.
- 2 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.
- 3 Irawan Jati, S.I.P., M.Hum., M.S.S., Ph.D.

Tanda Tangan

Hadza Min Fadhli Robby
Enggar Furi Herdianto
Irawan Jati

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

11 Juli 2025



GUSTI SYIFA NABILAH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik dan lancar. Karya ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk memperdalam pemahaman terhadap HUBUNGAN KOREA SELATAN-INDONESIA DI ERA MOON JAE IN DALAM PERSPEKTIF TEORI KEMITRAAN STRATEGIS, serta memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana di Prodi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, penyusunan karya ini tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya terhadap kemudahan saya dalam mengerjakan skripsi ini.
2. Kepada seluruh dosen Prodi Hubungan internasional yang memberikan saya seluruh ilmu sehingga saya bisa sampai pada titik ini.
3. Ibu Karina Utami Dewi, S.I.P., MA. selaku Kaprodi Hubungan Internasional.
4. Bapak Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc. selaku dosen pembimbing saya yang sudah memberikan dukungan serta bantuan terhadap saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Keluarga saya, papa, mama, dan adek selaku pilar utama yang memberikan dukungan kepada saya dalam penulisan ini.
6. Teman-teman Liberte, tanpa kalian mungkin penulis tidak akan bisa lanjut menulis jika tidak diberikan dorongan moral.
7. F4, terimakasih atas semangat antar kota yang selalu menjadi penyokong semangat penulis.
8. Freesia, terimakasih selalu menemani dan mendukung keputusan saya.
9. Teman-teman Dayatholic, yang telah menemani dan mengajarkan penulis saat masa kuliah dari awal hingga akhir, terimakasih atas memori yang berkesan.
10. Na Jaemin dan Mark Lee serta keseluruhan anggota SEVENTEEN dan BOYNEXTDOOR yang telah menjadi sumber utama semangat saya dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada alm nenek saya, terimakasih sudah menjadi alasan saya semangat dalam menulis skripsi dan saya berharap saya sudah menepati janji untuk menjadi cucu yang membanggakan.
12. Terimakasih untuk diri saya, Gusti Syifa Nabilah untuk sudah bertahan sejauh ini.
13. NIM 21323271, dengan bantuannya serta dukungan mental serta moral terhadap saya, terimakasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR SINGKATAN	x
ABSTRAK	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Cakupan penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.6 Kerangka Pemikiran	9
1.7 Argumen Sementara	11
1.8 Metode Penelitian	12
1.8.1 Jenis Penelitian	12
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	12
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	13
1.8.4 Proses Penelitian	13
1.9 Sistematika Pembahasan	13
BAB 2 NEW SOUTHERN POLICY & PERKEMBANGAN HUBUNGAN KOREA SELATAN-INDONESIA	15
2.1. Visi New Southern Policy	15
2.2. Sejarah Kerjasama Korea Selatan-Indonesia	21
2.3. Proses dan Pencapaian dalam Kerjasama	29
BAB 3 KEMITRAAN STRATEGIS OLEH KEDUA NEGARA	35
3.1. Perjanjian dan Deklarasi Bilateral yang Disepakati	35
3.2. Mekanisme Pertemuan Tingkat Tinggi antara Korea Selatan-Indonesia	39

3.3. Kerjasama Militer dan Pertahanan-Keamanan Korea Selatan-Indonesia	43
3.4. Kerjasama Ekonomi dalam Format IK-CEPA	46
3.5. Kerjasama Budaya dan Pertukaran pelajar/mahasiswa/i antara Korea Selatan-Indonesia	48
BAB 4	52
4.1. Kesimpulan	52
4.2 Rekomendasi	55
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR GAMBAR

Grafik 1. : Nilai dan Neraca Perdagangan Indonesia dan Korea Selatan (2017-2022)	49
---	----

DAFTAR SINGKATAN

AKFTA	: ASEAN-KOREA free trade agreement
ALUTSISTA	: Alat Utama Sistem Persenjataan
AS	: Amerika Serikat
BPKM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
DMZ	: Zona Demiliterisasi
EDCF	: Economic Development Cooperation Fund
FGD	: Forum Group Discussion
FTA	: Free Trade Agreement
HLDI	: High-Level Dialogue on Investment
IK-CEPA Agreement	: Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership
IKYEP	: Indonesia Korea Youth Exchange Program
Indonesia AID	: Indonesia Agency of International Development
IOT	: Internet of Thing
JDCC	: Joint Defence Cooperation Comitee
JSG	: Joint Study Group
KAI	: Korea Aerospace Industries
KASI	: Korea Asean Solidarity Iniative
KIEP	: Korea Institute for International Economic Policy
KSI	: King Sejeong Institute
KSS	: Korean Submarine Program
LDKPI	: Lembaga Dana Kerjasama Pembanguna Internasional

MOU	: Memorandum of Understanding
MOLIT	: Ministry of Land, Infrastructure and Transport
NAPCI	: Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative
NEAPC	: National Economic Advisory Planning Council
NNP	: New Northern Policy
NSP	: New Southern Policy
PDB	: Produk Domestik Bruto
PIPKOR	: Program Pertukaran Pemuda Indonesia Korea
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
ROK	: Republic of Korea
RECP	: Regional Comprehensive Economic Partnership
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
SPAM	: Sistem Penyediaan Air Minum
SSC	: South-South Cooperation

ABSTRACT

This research discusses the bilateral relationship between South Korea and Indonesia during the leadership of President Moon Jae In, using the strategic partnership theory framework developed by Vidya Nadkarni. The main focus of this research is to analyze how the strategic partnership approach is applied in various sectors of bilateral cooperation, including economy, defense, culture, and infrastructure development. The background of this research is based on the increasing importance of the Southeast Asian region in South Korea's foreign policy, which is concretely realized through the New Southern Policy (NSP) initiative. Indonesia was chosen as a key partner in the NSP due to its strategic position, political stability, and high market potential and economic growth. In Vidya Nadkarni's theory, strategic partnership is an option for non-hegemonic states to increase influence without having to be bound in formal alliances, through institutional interactions, high-level meetings, and multidimensional cooperation. This research uses a descriptive qualitative approach and relies on data from literature studies, official documents, and analysis of bilateral meeting.

Keyword: *Relation South Korea-Indonesia, Moon Jae in, strategic partnership, New Southern Policy, bilateral cooperation, Vidya Nadkarni theory, IK-CEPA, Southeast Asia*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Moon Jae In, dengan menggunakan kerangka teori kemitraan strategis yang dikembangkan oleh Vidya Nadkarni. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pendekatan kemitraan strategis diterapkan dalam berbagai sektor kerja sama bilateral, termasuk ekonomi, pertahanan, budaya, dan pembangunan infrastruktur. Latar belakang penelitian ini didasari oleh semakin pentingnya kawasan Asia Tenggara dalam kebijakan luar negeri Korea Selatan, yang secara konkret diwujudkan melalui inisiatif New Southern Policy (NSP). Indonesia dipilih sebagai mitra kunci dalam NSP karena posisi strategis, stabilitas politik, serta potensi pasar dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dalam teori Vidya Nadkarni, kemitraan strategis merupakan pilihan bagi negara non-hegemonik untuk meningkatkan pengaruh tanpa harus terikat dalam aliansi formal, melalui interaksi institusional, pertemuan tingkat tinggi, dan kerja sama multidimensi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan mengandalkan data dari studi literatur, dokumen resmi, dan analisis pertemuan bilateral.

Kata kunci: Hubungan Korea Selatan-Indonesia, Moon Jae-in, kemitraan strategis, Kebijakan Selatan Baru, kerja sama bilateral, teori Vidya Nadkarni, IK-CEPA, Asia Tenggara.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan antara Korea Selatan dan Indonesia telah dibangun pada tahun 1950. Saat itu, belum ada hubungan diplomatik formal antara kedua negara, sehingga belum terjadi bentuk kerja sama bilateral. Hubungan diplomatik baru secara resmi dibuka pada 17 September 1973. Sejak itulah, kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan mulai berkembang secara bertahap di berbagai bidang. Kerjasama dilakukan dengan hubungan bilateral berkembang di semua bagian, berawal dari politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, pertahanan, hingga teknologi. Pada masa kepemimpinan Park Geun Hye (2013-2017), Hubungan Korea Selatan telah terjalin baik dengan Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan pertahanan. Contohnya seperti IK-CEPA dan juga pembentukan KFX/IFX. Misi pengembangan kebudayaan dan ekonomi pun menjadi bagian dari misinya selama menjabat. Korea Selatan menyebarkan budayanya di Indonesia melalui dua jalur utama, yaitu secara formal melalui kerja sama antar pemerintah, dan secara informal melalui peran aktif masyarakat dalam mengonsumsi serta menyebarkan budaya populer Korea, seperti musik, drama, dan kuliner.

(Hardiyanti 2019).

Pada era Presiden Roh Tae-woo (1988-1993) memiliki formulasi istilah kebijakan luar negerinya '*Nordpolitik*' atau yang lebih dikenal dengan kebijakan utara, yang berusaha untuk mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara sosialis di Asia, seperti bekas Uni Soviet dan Cina. Strategi

pemerintah Korea ini adalah untuk mendapatkan akses ke pasar dan sumber daya baru di negara-negara ini dan juga untuk memperkuat posisi internasional Seoul terhadap Pyongyang. Sebagai hasilnya, Seoul dapat menormalkan hubungan dengan Cina pada tahun 1992, yang berdampak besar pada perkembangan ekonomi Korea. Pasar Cina yang besar dan sumber daya yang luas, mencakup kapasitas tenaga kerja, bahan baku, serta dukungan struktural dan ekonomi. Hal membuka peluang baru bagi kelompok *chaebol* atau konglomerat besar Korea. Dalam beberapa tahun, Cina muncul sebagai mitra dagang terbesar Korea dan perdagangan bilateral sebagian tetap menguntungkan Seoul, seperti efisiensi biaya dan memperbesar ekspor, yang pada akhirnya memperkuat pendapatan nasional dan posisi ekonomi Korea Selatan secara internasional. Normalisasi hubungan antara Seoul dan Beijing juga telah membawa peningkatan dramatis dalam kontak antar masyarakat dan popularitas produk budaya Korea, yang juga dikenal sebagai '*Korean Wave*' atau Hallyu di Cina. Peran Beijing juga menjadi sangat penting dalam isu denuklirisasi Korea Utara karena Cina menjadi tuan rumah 'Pertemuan Enam Pihak' yang membahas, isu denuklirisasi Korea Utara dan kemungkinan penyatuan kembali Semenanjung Korea sebagian besar tergantung pada dukungan China. Pertemuan itupun diikuti oleh Korea Utara, Korea Selatan, China, Russia, dan Jepang (Ko Sung Bin, n.d., 258-273).

Pada masa kepemimpinan Presiden Moon Jae in (2017-2022), Korea Selatan secara aktif memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, melalui inisiatif *New Southern Policy* (NSP). Dalam kerangka tersebut, Indonesia dipandang sebagai mitra strategis utama di kawasan, Indonesia dianggap sebagai pintu masuk penting bagi Korea Selatan ke

pasar regional Asia Tenggara dan kawasan Indo-Pasifik secara lebih luas (Sea Young (Sarah) 2022). Hal ini yang kemudian diwujudkan dalam peningkatan status hubungan menjadi Kemitraan Strategis Khusus pada 9 November 2017, saat kunjungan kenegaraan presiden Moon Jae In ke Jakarta (Choi 2019).

Saat 2017, “Presiden Korea Selatan Moon Jae In” membuat peraturan yang bernama “*New Southern Policy*”, yang bertujuan untuk memperkuat hubungan Korea Selatan dengan negara di Asia Tenggara termasuk juga Indonesia. Korea Selatan bertujuan untuk memperkuat hubungan dalam berbagai aspek, termasuk juga kerja sama ekonomi. Salah satu aspek penting dari kerja sama *New Southern Policy* ini adalah perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea “*Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement*” (IK-CEPA) yang berfokus pada akses pasar, fasilitasi perdagangan dan investasi, serta kerja sama dan peningkatan kapasitas. IK-CEPA yang dimulai pada tahun 2012 mengalami penghentian sementara pada tahun 2014 karena berbagai kendala, termasuk pergantian pimpinan dan kesulitan negosiasi. Hambatan dalam perundingan tersebut berdampak pada lingkungan bisnis dan hubungan investasi antara kedua negara. Meski demikian, volume perdagangan terus mengalami penurunan selama periode ini, menunjukkan perlunya penyesuaian strategi (Tiara, A. C., 2017; Ismail & Mulyaman, 2018).

New Southern Policy sendiri merupakan inisiatif diplomasi yang berupaya mengurangi ketergantungan Korea Selatan kepada beberapa negara barat dengan mengundang negara-negara di ASEAN, termasuk Indonesia sebagai mitra strategis baru. *New Southern Policy* menekankan pengembangan hubungan di bidang kemanusiaan dan perdamaian dimana hal ini telah mengarah pada

hubungan ekonomi yang lebih erat antara Korea Selatan dan Indonesia (Muhammad Taqy Dwi Putra 2024)

Dalam hal perdagangan, kedua negara melalui masing-masing Presiden sepakat untuk memperluas volume perdagangan hingga mencapai 30 miliar dolar AS pada tahun 2022 (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2018). Hal ini mencerminkan upaya bersama untuk memfasilitasi perdagangan bilateral dan meningkatkan kepentingan bersama. Investasi Korea Selatan di Indonesia meliputi berbagai sektor, seperti manufaktur, ritel, dan teknologi, dengan perusahaan-perusahaan seperti Hyundai, Lotte, Samsung, dan Posco berperan aktif dalam perekonomian Indonesia (Kemendag, 2023).

Sebagai bagian dari inisiatif kerja sama ekonomi regional, dibentuklah Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP). Perjanjian ini ditandatangani oleh Indonesia pada bulan November 2020. Tujuan utama RCEP adalah untuk membentuk kawasan perdagangan bebas terbesar di dunia dengan menurunkan tarif bea masuk, memfasilitasi perdagangan antar negara anggota, dan meningkatkan integrasi ekonomi regional. Melalui integrasi rantai pasokan regional, RCEP memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan investasi asing, membuka pasar ekspor baru, dan meningkatkan daya saing sektor domestik (Y. R. Damuri, 2023).

Pembentukan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) oleh negara-negara ASEAN bersama mitra mereka, termasuk Korea Selatan dan Indonesia, bertujuan untuk memperdalam perdagangan bebas dan memperluas pasar global. RCEP memberikan potensi ekonomi yang signifikan dengan

integrasi pasar yang besar, mencakup populasi dan PDB global yang substansial. Indonesia, sebagai anggota *G20*, diproyeksikan akan menjadi pusat ekonomi dunia dengan pertumbuhan PDB yang tinggi (Y. R Damuri, 2023).

Kerja sama dalam proyek infrastruktur antara kedua negara mencakup pengelolaan udara, transportasi, perumahan murah, dan pembangkit listrik. Melalui Global Infrastructure Fund dan Economic Development Cooperation Fund (EDCF), Korea Selatan mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia, sesuai dengan kebijakan ekonomi yang menekankan pertumbuhan inklusif dan manusiawi (La, M., 2017).

Melihat perkembangan diatas, skripsi ini akan melihat dari hubungan kerja sama ditengah Korea Selatan dan Indonesia dalam kerangka kemitraan strategis. Serta kerja sama antar Korea Selatan-Indonesia berupaya memperkuat kerja sama ekonomi, dan politik serta pertahanan, dan akan melihat aspek lain seperti budaya dalam konteks *New Southern Policy*.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana hubungan Korea Selatan dan Indonesia berkembang dalam kerangka kemitraan strategis di era Moon Jae In?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan dari dilakukannya penelitian terhadap judul ini adalah untuk memahami kemitraan strategis pada era Moon Jae In.

2. Memahami keterkaitan New Southern Policy dengan kemitraan strategis di Indonesia.
3. Memahami perkembangan terkini dari kerjasama Korea Selatan dan Indonesia.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini mengambil dan memiliki periode Moon Jae In sebagai presiden Korea Selatan tahun 2017-2022. Terhadap kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan terhadap *New Southern Policy*, dan Indonesia sebagai mitra penting. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan terhadap kedua Negara dalam bidang hubungan bilateral melalui kerja sama dengan teori *strategic partnership*. Batasan waktu pada penelitian ini ialah dimulai pada saat pertama kali Moon Jae In dilantik hingga selesai masa periodenya sebagai presiden Korea Selatan.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pertama diambil dari buku oleh Moe Thuzar, yang dimana dalam penelitiannya oleh Moe Thuzar berisikan tentang penjelasan new southern policy yang dilaksanakan “Presiden Korea Selatan yaitu Moon Jae In”. Dijelaskan sebagai inisiatif kebijakan luar negeri antar negara yang dilakukan oleh Presiden Moon Jae In, *New Southern Policy* membedakan keterlibatan Korea Selatan dengan ASEAN dari dominasi Tiongkok dalam kerja sama *ASEAN Plus Three*, dan dari prinsip-prinsip “dari hati ke hati” yang mendasari kebijakan Jepang terhadap Asia Tenggara dan ASEAN. Para analis Asia Tenggara dan Korea mengatakan bahwa NSP merupakan “kebijakan luar negeri khas” Presiden Moon, yang dibangun berdasarkan kebijakan pemerintahan sebelumnya untuk

menandakan keterlibatan diplomatik yang lebih kuat dan kehadirannya di Asia Tenggara (Moe Thuzar 2021).

Tinjauan kedua diambil dari jurnal oleh Devi Anggraeni Poetri dan rekan membahas, ekspansi ekonomi Asia Tenggara memberikan Korea Selatan kesempatan untuk berinteraksi dengan ASEAN, dan mengidentifikasi peluang baru untuk usaha kecil dan menengahnya. Korea Selatan juga menganggap stabilitas dan kedekatan geografis yang disediakan oleh ASEAN sama pentingnya. Pertama, secara geografis, Korea Selatan dekat dengan ASEAN. Kelas menengah yang berkembang di ASEAN dan pasar tenaga kerja murah yang disediakan oleh negara-negara seperti Vietnam, Kamboja, dan Laos merupakan faktor yang menarik bagi Korea Selatan.

Menurut sudut pandang ini, Indonesia berada dalam posisi yang lebih baik daripada negara-negara ASEAN lainnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan ketika hubungan Korea Selatan dan Indonesia dinaikan selaku aliansi strategis utama pada tahun 2006. Namun, sebelum Presiden Moon Jae In, kebijakan Korea Selatan terhadap ASEAN tidak selalu stabil atau konsisten. Sejak menjabat pada bulan Mei 2017, Moon telah memprioritaskan kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Asia Tenggara dengan “Kebijakan Selatan Baru”. Penyelesaian sejumlah isu bisa menentukan bagaimana kebijakan tersebut pada akhirnya akan terjadi. Memang, Korea Selatan telah lama memiliki kepentingan di kawasan ini. Seoul telah lama mengakui bahwa negara-negara Asia Tenggara sangat penting dalam mengelola hubungan dengan Korea Utara, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang dan investasi terbesar kedua bagi Korea Selatan sebelum Moon menjabat.

Berbeda dengan negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia memiliki masa lalu yang berbeda dengan Korea Selatan (Devi Anggraeni Poetri et al. 2018).

Tinjauan ketiga diambil dari buku Moch Faisal Karim berisikan, pencarian status kekuatan menengah Indonesia dilakukan melalui perannya sebagai pemimpin regional, penyuar negara-negara berkembang, pendukung demokrasi, dan pembangun jembatan. Sementara itu, dalam kasus Korea Selatan, pencariannya akan status kekuatan menengah telah dicapai melalui peran sebagai penyeimbang regional, pendukung pembangunan, dan pembangun jembatan.

Namun, peran-peran ini sama sekali tidak stabil karena terus berubah. Dengan membandingkan kedua negara, makalah ini menunjukkan bagaimana perbedaan peran historis, ego, dan perubahan ekspektasi peran, serta munculnya konflik peran, menjelaskan perbedaan bagaimana Indonesia dan Korea Selatan telah mengartikulasikan konsepsi peran mereka dalam pencarian status kekuatan menengah. Selain itu, kedua negara memiliki perbedaan dalam hal identifikasi diri sebagai kekuatan menengah. Sementara para pembuat kebijakan Korea Selatan memiliki pengalaman yang kuat dan luas dalam mengidentifikasi diri mereka dengan status kekuatan menengah, para pembuat kebijakan Indonesia baru saja mengidentifikasi diri mereka dengan status tersebut. Dengan demikian, Indonesia terlihat kurang berambisi dalam aktivitas pencarian status, sementara Korea Selatan menunjukkan ambisi yang lebih dari sekadar status kekuatan menengah (Moch Faisal Karim, 2018).

Dilihat dari kedua buku dan juga satu jurnal diatas. Ketiganya memang dengan jelas menjelaskan *new southern policy* yang dilakukan oleh moon jae in pada eranya sebagai presiden korea selatan. Dengan periodenya kemarin ia telah

menjalankan new southern policy terhadap beberapa Negara, terutama di ASEAN. Tetapi dapat dilihat dari keempat penelitian oleh buku dan jurnal diatas, dari ketiga penelitian tersebut tidak menjelaskan hubungan Korea Selatan-Indonesia dalam perspektif kemitraan strategis yang diambil melalui Vidya Nadkarni.

Dengan demikian penelitian ini memiliki kebaruan dari penelitian yang saya ambil sebagai contoh. Yang dimana di beberapa jurnal dan buku pun belum ada yang mengambil teori strategic partnership oleh Moon Jae In dalam periodenya.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan dikaji menggunakan teori strategic partnership oleh Vidya Nadkarni pada bukunya yang berjudul *Strategic Partnership in Asia: Balancing without alliances, Strategic partnerships call for greater engagement between the parties than mere ad hoc bilateral relationships that ensue as a result of normal diplomatic intercourse between states. They are, however, less inflexible than defensive military alliances, since they are neither explicitly targeted at a specific country nor contain binding defense commitments* (Nadkarni 2010,48), yang bila diterjemahkan ialah negara-negara bekerja sama secara terstruktur dan jangka panjang di berbagai sektor strategis. Dalam buku tersebut memiliki penjelasan mengenai hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan pada era Moon Jae In pada tahun 2017-2022 melalui pendekatan dan strategi *strategic partnership*. Lepas dari ikatan ideologis era Perang Dingin, perhitungan geopolitik negara-negara berfokus pada ancaman keamanan tradisional (antar negara) dan ancaman keamanan baru (non-negara) dan fokus utamanya

adalah pada kekhawatiran terhadap pembangunan ekonomi domestik di tengah meningkatnya arus globalisasi. Pendekatan kebijakan luar negeri Cina, India, dan Rusia cukup fleksibel untuk menghasilkan hasil-hasil regional yang kontinjen (perdamaian, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi versus kompetisi, konflik, persaingan ekonomi, dan ketegangan keamanan).

Kemitraan ini memiliki kerja sama luas tanpa mengikat dalam komitmen militer seperti aliansi. Itulah mengapa banyak negara menengah mengadopsi model ini. Yaitu, strategi luar negeri atau kebijakan diplomatik yang dirancang oleh negara-negara non-hegemonik (kekuatan menengah atau kecil) untuk melindungi kepentingan nasional mereka tanpa harus terjebak dalam konflik kekuatan besar.

Hubungan semacam itu umumnya mengandung beberapa elemen umum yang menjalin hubungan antara negara-negara yang bukan sekutu atau musuh, tetapi memiliki berbagai kepentingan yang sama dan berbeda: (1) hubungan tersebut diformalkan dalam berbagai deklarasi tertulis, pernyataan, perjanjian, dan nota kesepahaman yang menguraikan tujuan kebijakan yang jelas dan berusaha membangun dan memperdalam hubungan yang beraneka ragam; (2) hubungan tersebut menciptakan hubungan kelembagaan formal pada berbagai tingkat pemerintahan dan non-pemerintahan, menghasilkan berbagai saluran interaktif pada tingkat diplomasi Jalur I (resmi) dan Jalur II (antarwarga); (3) hubungan tersebut menciptakan mekanisme untuk pertemuan puncak antara para pemimpin tertinggi yang diadakan secara bergantian di ibu kota kedua negara, dengan pertemuan yang lebih sering di tingkat subkementerian dan birokrasi di mana para pemimpin tersebut dapat saling bertukar pikiran dan bertukar informasi;

hubungan tersebut dapat menciptakan hubungan yang lebih luas dan lebih dalam antara kedua negara, dan hubungan tersebut dapat menciptakan hubungan yang lebih luas dan lebih dalam antara kedua negara. (4) mereka bekerja untuk mengembangkan hubungan antara militer masing-masing melalui latihan militer bersama, mengadakan kunjungan kapal-kapal angkatan laut, dan melakukan upaya-upaya untuk membangun rasa saling percaya; (5) mereka berusaha membangun hubungan ekonomi yang lebih kuat; dan akhirnya, (6) mereka berusaha menumbuhkan kesadaran yang lebih besar akan budaya satu sama lain melalui pertukaran pemuda dan pameran budaya (Nadkarni 2010).

1.7 Argumen Sementara

Hubungan bilateral ditengah “Korea Selatan-Indonesia” telah sudah dalam kerangka kemitraan strategis. Hal ini dapat dilihat dengan penguatan bilateral kemitraan strategis dibuktikan dengan aspek didorong oleh beberapa hal,

1. Adanya perjanjian kemitraan strategis yang membuat hubungan Korea Selatan dan Indonesia mengalami peningkatan pada era Jokowi dan Moon Jae In yang telah disepakati.
2. Perjanjian kemitraan strategis dilanjut dengan pertemuan pertemuan selanjutnya terkait kerjasama.
3. Adanya *High Level Summit* yang sesuai dengan buku Vidya Nadkarni.

Dalam kedatangan pertamanya ke Asia Tenggara pada bulan November 2017, Presiden Moon Jae-in mengunjungi Vietnam, Indonesia, dan Filipina. Dalam perjalanan inilah ia pertama kali meluncurkan Kebijakan Selatan Baru. Rencana dan inisiatif pemerintah baru untuk ASEAN tidak sepenuhnya

diungkapkan dalam pernyataan awal NSP. Hanya prinsip-prinsip panduan - People, Prosperity, and Peace, atau 3P - serta beberapa inisiatif ekonomi khusus untuk tiga negara yang dikunjunginya - Vietnam, Indonesia, dan Filipina - yang disebutkan dalam NSP.

"Rakyat" adalah yang pertama di antara prinsip-prinsip Presiden Moon terhadap ASEAN. Presiden Korea Selatan telah menempatkan rakyat atau warga negara biasa sebagai salah satu ciri utama kebijakannya. Meskipun slogan ini tidak sering digunakan dalam kampanye pemilihan presiden ke-19, slogan kampanye utamanya untuk tawarannya yang gagal di tahun 2012 adalah "People First, Korea". Penekanan pada kepedulian, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat atau masyarakat biasa ini sangat sesuai dengan prinsip 'Masyarakat yang Berpusat pada Rakyat' dari Komunitas ASEAN atau slogan 'Masyarakat Peduli' dari Komunitas ASEAN.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis studi yang dipakai ialah teknik kualitatif deskriptif dengan menjabarkan strategi dan kerjasama yang dilakukan Moon Jae In bersama dengan Indonesia pada tahun 2017-2022 melalui teori *strategic partnership* melalui buku Vidya Nadkarni.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek (politik luar negeri moon jae in) pada penelitian ini adalah seorang Moon Jae In sebagai presiden Korea Selatan dengan periode 2017-2022. Sedangkan objek penelitian (hubungan kedua negara) sendiri adalah berupa

strategi dan kerjasama yang dilakukan Moon Jae In terhadap Indonesia, dalam menjalin tali kerjasama antar kedua Negara tersebut.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang berupa studi kepustakaan melalui buku, jurnal, dan artikel-artikel yang relevan untuk mengkaji penelitian ini secara lebih lanjut.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data, serta dilanjutkan dengan pengolahan data, dan eksplanasi data secara tertulis. Tahap pengumpulan data meliputi pengumpulan referensi bacaan yang relevan untuk kemudian di baca.

1.9 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada proposal ini akan dijabarkan dengan 4 bab,

1. Bab 1 mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, serta proses penelitian dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.
2. Bab 2 akan berisi penjelasan *new southern policy* di Indonesia yang dijalankan Moon Jae In.
3. Bab 3 akan menjelaskan dinamika hubungan Korea Selatan-Indonesia, peran Moon Jae In sebagai presiden Korea Selatan dalam menjalani

hubungan bilateral dengan menggunakan sistem strategic partnership selama 10 tahun ke belakang.

4. Bab 4 akan berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB 2

NEW SOUTHERN POLICY & PERKEMBANGAN HUBUNGAN KOREA SELATAN-INDONESIA

2.1. Visi New Southern Policy

Pemerintah Korea Selatan menerapkan strategi luar negeri baru selama era Moon Jae In yang dikenal sebagai “Kebijakan Selatan Baru”, yang dihargai dengan baik oleh India dan negara-negara ASEAN. Sejak diperkenalkan pada tahun 2017, kebijakan luar negeri ini telah mengarah pada peningkatan keterlibatan dan kolaborasi di berbagai bidang seperti kerja sama ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, dan militer, serta peningkatan bantuan luar negeri setiap tahunnya (Jaehyon Lee 2019).

New southern policy di Korea Selatan yang dilakukan dibawah peran oleh Korea Institute for International Economic Policy (KIEP) dan juga *Ministry of Foreign Affairs (New Southerrn Policy/NSP)* yang diinisiasi pemerintahan “Presiden Moon Jae-in” bertujuan untuk memperkuat keterkaitan strategis Korea Selatan dengan negara Asia Tenggara serta India. Tujuan utama dari peraturan ini adalah membangun kemitraan yang setara dan saling menguntungkan, dengan fokus pada kerja sama ekonomi, sosial, dan budaya, serta memperkuat multilateralisme di kawasan.

Dalam konteks “kerja sama selatan-selatan” (*South-South Cooperation/SSC*), mencerminkan peran aktif Korea Selatan sebagai kekuatan menengah (*middle power*) yang berupaya memperluas jaringan diplomatik dan ekonomi di luar aliansi tradisionalnya. Dengan menjalin hubungan yang lebih erat

dengan negara-negara berkembang di Asia Selatan dan Tenggara, Korea Selatan berkontribusi pada penguatan kerja sama Selatan-Selatan yang bertujuan untuk pembangunan bersama dan pengurangan ketimpangan global (Jaehyon Lee 2019).

Secara umum, faktor politik lokal dan regional yang melingkupi ekonomi dan keamanan Korea Selatan adalah apa yang menyebabkan terbentuknya Kebijakan Selatan Baru. Karena Korea Selatan terletak di wilayah di mana negara-negara kuat seperti AS, Cina, dan Rusia memiliki kepentingan pribadi, pemerintah sering kali berada dalam posisi yang sulit. Selama era Moon Jae In, pemerintah Korea Selatan mempertimbangkan kembali keputusannya untuk memprioritaskan kerja sama regional karena gejolak politik dan keamanan di Asia Timur.

Dalam dokumen yang berjudul New Southern Policy Plus yang berisikan setiap pertemuan yang dilakukan pihak Korea Selatan terhadap negara yang menjalin hubungan kerjasama bilateral, dapat dilihat bahwa Moon Jae In selaku Presiden Korea Selatan memberikan *statement* ‘Tahun ini merupakan tahun yang berarti yang menandai peringatan 10 tahun kemitraan strategis antara ASEAN dan Korea. Korea telah menyusun New Southern Policy Plus. ‘New Southern Policy Plus’ mewujudkan tujuh inisiatif kerja sama termasuk ‘kerja sama kesehatan masyarakat yang komprehensif’ Dapat dilihat bahwasannya *statement* ini menjadi salah satu pernyataan terkait ketertarikan Moon Jae In sebagai mitra kerjasama dengan Indonesia dalam hubungan kerjasama bilateral (Presidential Committee on New Southern Policy 2020).

Sebagai presiden baru Korea Selatan, Moon Jae In secara alami akan memimpin dan membawa inovasi pada kebijakan luar negerinya, karena ia

memiliki visi dan misi yang berbeda dari Presiden Park Geun Hye. Peran Moon Jae In sebagai pemimpin baru Korea Selatan adalah untuk meningkatkan apa yang sudah baik dan memperbaiki kesalahan. Salah satu contohnya adalah meningkatnya daya tarik global budaya Korea, yang diterima dengan baik oleh orang-orang di mana saja, terutama di Asia Tenggara dan India.

Presiden Moon pertama kali muncul dalam manifesto pemilihannya. Diplomasi kooperatif dengan empat mitra utama Korea - AS, Cina, Jepang dan Rusia - dan NEAPC merupakan salah satu komitmen politik Moon Jae In dalam bidang kebijakan luar negeri. Manifesto tersebut menguraikan tiga hal utama di bawah inisiatif NEAPC: “memperkuat kerja sama trilateral Korea, Cina, Jepang dan melanjutkan Pembicaraan Enam Pihak”, “membangun NEAPC (*National Economic Advisory Planning Council*) dengan mengintegrasikan kerja sama keamanan multilateral dan komunitas ekonomi”, dan akhirnya, “meningkatkan ASEAN dan India sebagai mitra ekonomi, politik dan strategis yang sejajar dengan empat negara besar”.² Ini merupakan pertama kalinya ASEAN disebut-sebut dalam kampanye pemilihan presiden (Jaehyon Lee 2019).

Pembahasan ini tertuju pada menganalisis pilar utama *New Southern Policy*: kerja sama perdamaian atau membangun komunitas perdamaian bersama dengan ASEAN. Elemen ini merupakan tambahan baru dalam inisiatif Korea terhadap ASEAN yang selama ini sebagian besar didominasi oleh kerja sama ekonomi (Kemakmuran) dan pertukaran sosial-budaya (Rakyat). Kemudian, orang mungkin akan bertanya - apa yang baru dengan 'Kerjasama Perdamaian' di bawah *New Southern Policy*? Perhitungan strategis seperti apa yang dimiliki Korea dalam mengejar kerjasama perdamaian. Yang paling penting, apakah hal itu

memiliki implikasi terhadap masalah keamanan Korea yang paling penting, yaitu masalah semenanjung Korea? Pada bagian keempat dari artikel ini, penulis memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Setelah pengantar singkat ini, makalah ini pertama-tama menjelaskan apa itu *New Southern Policy*, termasuk visi menyeluruh *Northeast Asia Plus Community*, di mana *New Southern Policy* menjadi bagiannya (Jaehyon Lee 2019).

Dalam satu dekade terakhir, Tim Koordinasi Nasional SSC (*South-South Cooperation*) selalu melakukan perbaikan guna meningkatkan kualitas, efektivitas, dan akuntabilitas SSC (*South-South Cooperation*) Indonesia, antara lain dengan menyusun pedoman (panduan dan prosedur operasi standar) untuk menjaring permintaan, pelibatan aktor non-negara, strategi komunikasi, serta alat untuk pemantauan dan evaluasi program pelatihan, lokakarya, serta pengiriman tenaga ahli. SSC (*South-South Cooperation*) hal ini juga telah dimasukkan ke dalam kebijakan luar negeri Indonesia dan merupakan salah satu prioritas negara dalam hal stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan serta rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020–2024, transformasi layanan publik dibahas (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2020).

Sejak menjadi negara berpenghasilan menengah, peran Indonesia dalam SSC (*South-South Cooperation*) awal berubah dari negara penerima bantuan menjadi salah satu “negara donor baru yang sedang berkembang” dengan secara terus-menerus memberikan hibah dan bantuan untuk kerja sama teknis. Saat 2019, “Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional” (LDKPI) atau

disebut pula dengan nama “Indonesia Agency for International Development” (Indonesian AID) dibentuk (Kementerian Investasi/BKPM 2022).

Seiring dengan semakin pentingnya peran negara berkembang dalam perekonomian global, SSC kini semakin mendapat perhatian sesuai dengan prinsip Indonesia. Definisi yang berbeda ditawarkan oleh kelompok dan orang yang berbeda. Beragamnya sudut pandang tentang subjek ini tercermin dalam definisi-definisi tersebut. Secara umum, SSC telah berkembang menjadi kerangka kerja yang penting bagi negara-negara berkembang untuk saling bertukar pengetahuan, informasi, dan pengalaman. Sebagai anggota forum G-20, peran Indonesia dalam SSC telah berkembang seiring dengan peningkatan posisinya sebagai “negara berpenghasilan menengah”, sehingga menjadikannya “donor baru” dalam SSC-yakni negara yang berperan sebagai penerima sekaligus pemberi bantuan kepada negara penerima (Abdurachman & Prakoso 2017).

Saat ini, program-program terdepan SSC Indonesia meliputi: (a) manajemen bencana; (b) energi nuklir dan militer; (c) perdagangan dan industri; (d) pembangunan manusia; (e) infrastruktur; dan (f) pertanian, ketahanan pangan, dan jaminan sosial (Abdurachman & Prakoso 2017).

Pada bulan Juli 2017, pemerintahan Moon Jae-in mengumumkan 100 prioritas kebijakan nasional. Khususnya, sebuah konsep baru yang disebut 'Komunitas Asia Timur Laut Plus untuk Berbagi Tanggung Jawab' untuk pertama kalinya diperkenalkan kepada publik (Jaehyon Lee 2019).

Komite transisi kepresidenan untuk kebijakan luar negeri dan keamanan nasional menyiapkan laporan tentang NEAPC (*National Economic Advisory Planning Council*). Rencana ini memiliki tiga komponen: Platform Perdamaian

dan Kerjasama Asia Timur Laut (NAPCP), Kebijakan Utara Baru (NNP), dan Kebijakan Selatan Baru (NSP). Meskipun Asia Timur Laut dan kebijakan Utara telah lama menjadi bagian integral dari kebijakan luar negeri Korea, namun NSP merupakan tambahan baru. Dalam banyak hal, NAPCP memiliki banyak kesamaan dengan apa yang disebut sebagai Prakarsa Perdamaian dan Kerja Sama Asia Timur Laut atau NAPCI (*Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative*). Inisiatif Perdamaian dan Kerjasama Asia Timur Laut atau NAPCI (*Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative*) dari pemerintahan Park Geun-hye sebelumnya. Pertanyaan keamanan inti seputar Semenanjung Korea dan ancaman nuklir Korea Utara tidak jauh berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. *New Northern Policy* (NNP) dengan nama yang berbeda telah tertanam dalam kebijakan luar negeri Korea di hampir setiap pemerintahan (Jaehyon Lee 2019).

Presiden Moon Jae-in pertama kali mengungkapkan Kebijakan Selatan Baru dalam kunjungan pertamanya ke Asia Tenggara -mengunjungi Vietnam, Indonesia, dan Filipina- pada bulan November 2017. Pengumuman awal NSP tidak berisi rincian lengkap tentang inisiatif dan gagasan pemerintah baru terhadap ASEAN. NSP hanya menyebutkan prinsip-prinsip panduan - *People, Prosperity and Peace* atau 3P - dan beberapa program ekonomi yang dirancang untuk tiga negara, Vietnam, Indonesia, dan Filipina (Jaehyon Lee 2019).

Kebijakan Selatan Baru "*New Southern Policy*" dan Kebijakan Utara Baru "*New Northern Policy*" yang diterapkan Korea Selatan tidak bersifat kompetitif, melainkan saling melengkapi dan mendukung. Keduanya merupakan strategi yang bertujuan untuk memperluas jangkauan diplomasi dan kerjasama ekonomi Korea Selatan dengan negara-negara di luar Semenanjung Korea.

Dalam rangka memenuhi harapan publik dan memajukan kepentingan nasional, pemerintah Korea Selatan mengantisipasi *new southern policy*, yang kemudian dikenal sebagai strategi Selatan Baru.

2.2 Sejarah Kerjasama Korea Selatan-Indonesia

Dalam rangka memajukan kepentingan nasional masing-masing, Indonesia sebagai negara berkembang sudah menyatukan keterkaitan diplomatik dengan sejumlah negara di seluruh dunia. Keterkaitan ini dilaksanakan pada semua bagian. Setelah menjalin hubungan diplomatik selama tujuh tahun, Korea Selatan dan Indonesia mulai menjalin hubungan konsuler pada tahun 1973, yang menandai dimulainya hubungan kerja sama bilateral. Hubungan dan kerja sama yang baik, termasuk kerja sama bilateral, regional, dan multilateral, masih terus ditingkatkan antara Korea Selatan dan Indonesia.

Pada tahun 2006, Republik Korea dan Republik Indonesia menandatangani “Deklarasi Bersama tentang Kemitraan Strategis untuk Mempromosikan Persahabatan dan Kerjasama” yang menandai dimulainya kerja sama bilateral antara kedua negara. Karakter saling melengkapi dari sumber daya dan keunggulan kedua negara berfungsi sebagai dasar untuk mempromosikan kerja sama bilateral di antara mereka dengan proses pengembangan ekonomi dan sistem politik kedua negara, yang sangat menguntungkan untuk menciptakan peluang kerja di berbagai sektor industri. Peluang investasi yang sangat baik dan sumber pembiayaan tersedia di Korea Selatan. Selain itu, Korea Selatan memandang Indonesia, yang juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat, sebagai mitra yang signifikan, dan kedua negara berusaha keras untuk

memperkuat kolaborasi bilateral, regional, dan internasional. (Ministry Of Foreign Affairs 2022).

Jepang pernah menjajah Korea Selatan dan Indonesia, di antara negara-negara lainnya. Korea Selatan memperoleh kemerdekaan pada tanggal 15 Agustus 1945, dan Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, keduanya dibebaskan dari kekuasaan kolonial Jepang pada bulan dan tahun yang sama. Ketika Korea Selatan bergabung dengan daftar negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia, hubungan kedua negara secara resmi dimulai. Pada bulan Desember 1949, Korea Selatan membuat deklarasi tersebut (Ministry Of Foreign Affairs 2022).

Kedua negara kemudian memutuskan untuk menandatangani hubungan diplomatik pada tahun 1966, membangun hubungan tingkat konsul di antara mereka untuk pertama kalinya. Kemudian, pada bulan Desember di tahun yang sama, Korea Selatan mendirikan Konsulat Jenderal di Jakarta. Pada bulan Februari 1968, Indonesia juga mendirikan Konsulat Jenderal di Seoul. Kedua negara kemudian melanjutkan hubungan mereka ke tingkat yang lebih tinggi ketika hubungan tingkat konsulat didirikan. Duta Besar dari kedua negara menjalin hubungan diplomatik pada bulan September 1973. Setelah pembentukan hubungan diplomatik, kunjungan kenegaraan Presiden Abdurrahman Wahid menandai dimulainya kunjungan timbal balik antara kedua negara pada tahun 2000 hingga kunjungan terbaru yang dilakukan oleh presiden Joko Widodo pada tahun 2016 dan kunjungan presiden Moon Jae-In pada tahun 2017 (Kedutaan Besar Republik Indonesia 2017).

Seiring dengan semakin populernya budaya Korea Selatan di kalangan masyarakat Indonesia, kerja sama bilateral melalui bidang sosial-budaya pun semakin meningkat. Pada tahun 2006, kedua negara juga telah menyepakati Nota Kesepahaman (MoU) di bidang pariwisata, yang terkait dengan kerja sama di bidang sosial-budaya. Pada bulan Mei 2008, Komite Kebudayaan Indonesia-Korea Selatan bertemu di Yogyakarta sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut (Kedutaan Besar Republik Indonesia 2017).

Dalam kerjasama di bagian “sosial-budaya Indonesia dan Korea Selatan” juga banyak melakukan pertunjukan budaya antara kelompok seni budaya kedua negara. Korea Selatan sangat aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan promosi budaya internasional di berbagai kota di Korea Selatan, seperti Seoul dan Busan. Pada kesempatan tersebut telah dimanfaatkan oleh sejumlah kelompok seni tari dan budayawan dari Indonesia untuk berpromosi di Korea Selatan. Bukan hanya itu, melalui kerjasama ini Indonesia juga memanfaatkan Bahasa Indonesia yang merupakan bagian dari kebudayaannya sebagai salah satu media dalam diplomasi budaya yang dilakukan 33 terhadap Korea Selatan melalui diplomasi publik.

Kata K-Pop telah mendapatkan pengakuan internasional berkat popularitas yang terus meningkat dari budaya pop Korea, yang terlihat dalam berbagai produk budaya populer seperti musik, drama, dan film. Karena musik K-Pop sangat populer di seluruh dunia, ia telah mempengaruhi budaya modern. Akibatnya, Kamus Oxford kini memasukkan frasa “K-Pop.” Mengingat persaingan yang ketat dari budaya pop yang lebih mapan seperti musik Amerika dan Jepang, ini merupakan pencapaian yang luar biasa bagi budaya pop Korea.

Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Perdagangan dan Industri Kreatif serta Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melakukan kunjungan ke Korea Selatan untuk melihat secara langsung infrastruktur dan sistem industri kreatif Korea yang memunculkan budaya pop Korea yang telah mengglobal, setelah menyadari kehebohan yang ditimbulkan dari budaya populer Korea serta efek positifnya secara langsung di negara asalnya.

Perekonomian Indonesia telah diuntungkan oleh hubungan dagang kedua negara yang telah terjalin sejak lama. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), minat investasi sebesar 16 miliar dolar AS yang teridentifikasi di Korea Selatan antara 22 Oktober 2014 dan 4 Desember 2015 (Republika 2016).

Selain itu, investor Korea Selatan terus menunjukkan minat yang besar terhadap Indonesia, dan pada tahun 2015 (Januari hingga September), investasi Korea Selatan merupakan investor terbesar keempat di Indonesia. Penandatanganan MoU antara Kepala BKPM dan Woori Bank, Korea Selatan, untuk mempromosikan investasi Korea Selatan di Indonesia disambut baik oleh kedua menteri. Diharapkan kerjasama ini dapat membantu menarik minat para pelaku usaha Korea Selatan untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Pada awal tahun 2006, pembahasan dan pengembangan ekonomi kreatif dan industri kreatif di Indonesia mulai dilakukan. Setelah beberapa tahun berlalu, pemerintah, sektor swasta, dan para praktisi sendiri mulai lebih banyak membahas tentang ekonomi kreatif dan industri kreatif. Kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan dalam pengembangan ekonomi kreatif menjadi salah satu pilar penting hubungan bilateral kedua negara. Korea Selatan, yang memiliki pengalaman sukses dalam membangun industri kreatif global melalui K-Wave

atau Hallyu, telah banyak membantu Indonesia dalam berbagai aspek, mulai dari transfer teknologi hingga promosi budaya. Dukungan ini menjadi pendorong signifikan bagi sektor ekonomi kreatif Indonesia, yang mencakup berbagai bidang seperti seni pertunjukan, musik, animasi, film, hingga teknologi digital (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2023).

Selain itu, kerja sama di industri musik dan hiburan juga menjadi sorotan. Korea Selatan, dengan industri K-Pop yang mendunia, menjadi inspirasi bagi pengembangan sektor musik dan hiburan Indonesia. Beberapa perusahaan hiburan besar Korea, seperti CJ E&M dan SM Entertainment, telah menjalin kerja sama dengan mitra lokal Indonesia untuk memproduksi konten kreatif. Salah satu bentuk kolaborasi adalah ajang pencarian bakat, seperti Galaxy Superstar, yang didukung oleh agensi Korea untuk menemukan talenta baru di Indonesia. Selain itu, kolaborasi antara musisi Indonesia dan artis K-Pop semakin meningkatkan popularitas karya lokal di pasar internasional, sekaligus memperkenalkan budaya Indonesia ke khalayak global (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2023).

Untuk menjalin hubungan yang baik dan harmonis antar negara diperlukan upaya untuk saling mengenal karakter satu sama lain. Dalam hal ini kebudayaan memiliki peranan yang penting bagi suatu negara untuk menunjukkan karakternya. Aspek kebudayaan juga memiliki pengaruh terhadap kebijakan kebijakan pemerintah suatu negara khususnya dalam hal ini kebijakan luar negeri. Kebudayaan juga merupakan salah satu perangkat soft power diplomacy yang dapat mendukung hubungan masyarakat antar negara dan memiliki bahasa

universal yang dapat dipahami oleh seluruh umat manusia tanpa memandang perbedaan (Fuad, 1983: 4).

Ketika terpilih menjadi presiden pada 2013, kebijakan luar negeri Presiden Park Geun-hye termaktub dalam satu narasi besar *trustpolitik*. Narasi *trustpolitik* melingkupi beberapa visi kebijakan luar negeri masa itu, salah satunya *Eurasia Initiative* (Lee 2014). Eurasia Initiative merangkumi variasi kebijakan Seoul terhadap Rusia, Asia Tengah, Kaukasus Selatan yang menghubungkan Semenanjung Korea menuju kawasan Eropa-Asia dan integrasi perdamaian antarKorea melalui kerja sama multilevel dengan aktor superbenua Eurasia (Tuyserkani 2020).

Secara objektif & rencana implementasi, beberapa sektor (konsep) kerja sama pembangunan berkuat pada konektivitas, ekonomi kreatif, & perdamaian, termasuk proyek transportasi berorientasi deeskalasi konflik melibatkan Korea Utara. Peralihan figur presiden kepada Moon Jae-in pada 2017 menimbulkan beberapa perubahan kebijakan luar negeri Korea Selatan. Hal ini dapat ditelusuri dari berbagai aktivitas & keputusannya yang dapat diamati publik (Moe Thuzar 2021).

Dilansir dari koran lokal dari media setempat negara Korea Selatan meliputi saat presiden Korea Selatan Moon Jae In hadir dalam pertemuannya dengan negara Indonesia. Presiden Moon Jae-in meluncurkan “Kebijakan Selatan Baru” Korea dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia, di Jakarta pada tanggal 9 November. Menghadiri Forum Bisnis Korea-Indonesia di Hotel Ritz-Carlton di Jakarta, Presiden Moon mengatakan, “Ini adalah tujuan saya untuk meningkatkan hubungan Korea dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia

Tenggara (ASEAN) ke tingkat yang sama dengan hubungannya dengan empat negara besar di sekitar Semenanjung Korea.” (Sohn 2017).

Kedua negara meningkatkan hubungan menjadi *Strategic Partnership*, yang kemudian berkembang menjadi *Special Strategic Partnership* pada tahun 2017 saat Presiden Moon Jae-in melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Momen ini sekaligus menjadi titik awal implementasi *New Southern Policy*, kebijakan luar negeri Korea Selatan yang menempatkan Indonesia sebagai mitra utama di kawasan Asia Tenggara. Visi NSP yang berlandaskan pada tiga pilar—People (hubungan antarmasyarakat), Prosperity (kemakmuran bersama), dan Peace (perdamaian)—dijabarkan dalam berbagai bentuk kerja sama yang telah berlangsung sebelumnya, namun diperkuat dan diperluas secara lebih strategis. Kedua pemimpin menegaskan perlunya menyelesaikan negosiasi Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) yang komprehensif, modern, berkualitas tinggi, dan saling menguntungkan sejak dini, tidak hanya dengan tujuan untuk memperluas perdagangan bilateral antara Republik Korea dan Republik Indonesia, namun juga untuk meningkatkan kemakmuran di kawasan ini (Yonhap News Agency 2017).

“Pemerintah Korea akan sangat mendorong Kebijakan Selatan Baru untuk secara dramatis meningkatkan hubungan kerja sama dengan ASEAN,” tegas oleh Moon Jae in. Presiden kemudian menguraikan strategi konkret yang mendasari serangkaian kebijakan baru ini, termasuk memperluas pertukaran teknologi, warisan budaya, seni dan masyarakat Korea-ASEAN terutama dengan Indonesia, serta memperkuat kerja sama dalam bidang-bidang seperti transportasi, energi, sumber daya air, dan teknologi informasi (Eric J. Ballbach 2023).

Moon Jae In menyampaikan bahwasannya ia mengharapkan tercapainya 3 hal dalam New Southern Policy untuk menghubungkan individu dengan individu lainnya melalui komunitas perdamaian yang dapat berkontribusi pada perdamaian. Kehidupan yang bedampingan dan kemakmuran, dimana negara-negara berkembang di ASEAN seperti Indonesia memiliki kerjasama ekonomi yang menguntungkan. Ia pun menambahkan bahwa ia sangat senang bekerjasama dengan Indonesia untuk tujuan-tujuan satu sama lain dengan mendalam.

Presiden Moon juga menjelaskan rencana pemerintahnya untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Rencana tersebut terdiri dari enam bidang kerja sama inti (Sohn 2017). Sebelum membahas inisiatif kebijakan dari pemerintahan lain setelah Presiden Kim, perlu dicatat dengan jelas bahwa kemitraan dan kerja sama praktis antara ASEAN dan Korea telah berkembang secara terus menerus di bawah tiga presiden setelah Kim: Roh Moo-hyun, Lee Myung-bak dan Park Geun-hye. Hal ini terutama disebabkan oleh tiga faktor yang berbeda namun saling terkait. Dasar kerja sama telah diletakkan di bawah kepemimpinan Kim Dae-jung di sisi Korea. Karena kerja sama regional seperti ASEAN+3 dan KTT Asia Timur (EAS), Korea harus berpartisipasi dalam proyek kerja sama multilateral di bawah kerangka kerja kelembagaan ini.

Selain itu, momentum regionalisasi meningkatkan interaksi ekonomi. Indonesia dan Korea saling terkait erat satu sama lain secara ekonomi dan bisnis swasta yang berinvestasi dan berdagang dengan Indonesia mendorong kerja sama antar-pemerintah dengan Indonesia. Namun demikian, tiga pemerintahan setelah Presiden Kim menunjukkan komitmen yang lebih lemah terhadap Indonesia (Sohn 2017).

2.3 Proses dan Pencapaian dalam Kerjasama

Hubungan ekonomi antara Indonesia dan Korea sangat penting. ASEAN meliputi Indonesia adalah mitra dagang nomor dua Korea dan Korea menduduki peringkat ke-6 untuk ekspor, peringkat ke-5 untuk impor, dan peringkat ke-5 untuk perdagangan secara keseluruhan.

Dalam hal ini munculah pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini.

1. Moon Jae In (Presiden Korea Selatan) (2017-2022) : Pemyuara *new southern policy* dan hadir dalam pertemuan pada bulan November 2017 dan September 2018 dengan bahasan mempromosikan keterlibatan tingkat KTT dan kerangka kerja kesepakatan.
2. Jokowi (Presiden Indonesia) (2014-2024) : Kunjungan kenegaraan yang dipimpin bersama; mengadvokasi IK-CEPA; terlibat dalam dialog tentang pertahanan dan investasi; membina hubungan diplomasi budaya Francis Chan, Wahyudi Soeriaatmadja, 2017)
3. Kang Kyung Hwa (Menteri Luar negeri Korea Selatan) (2017-2021) : Mendeklarasikan Indonesia sebagai mitra NSP pusat pada bulan April 2019 dalam pertemuan bersama.
4. Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri Indonesia) (2014-2024) : Pertemuan yang diketuai bersama, kunjungan Chung Eui-yong pada Juni 2021, mendorong kerja sama kesehatan (vaksin, kesejahteraan diaspora).
5. Choo Kyunghoo (Menteri Keuangan Korea Selatan) (2022-2023) : Pertemuan Finance Ministers and Central Bank Governors ke-3

(FMCBG) membahas memperdalam kerja sama di bidang perdagangan dalam segi New Southern Policy.

6. Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan Indonesia) (2014-2024) : pertemuan Finance Ministers and Central Bank Governors ke-3 (FMCBG) membahas memperdalam kerja sama di bidang perdagangan dalam segi New Southern Policy.

Pada tahun 2017, ekspor Korea ke ASEAN adalah USD 95,3 miliar dan impor Korea dari ASEAN adalah USD 53,8 miliar, yang membuat total volume perdagangan antara Korea dan ASEAN hampir mencapai USD 150 miliar. Perdagangan dengan ASEAN menyumbang 14% dari total perdagangan Korea. Hanya perdagangan dengan Cina, yang mencapai USD 240 miliar pada tahun 2017, yang melebihi perdagangan dengan ASEAN pada tahun yang sama.¹² Asia Tenggara adalah tujuan investasi terbesar kedua bagi Korea. Dari sudut pandang ASEAN, Korea adalah investor terbesar ke-6 di negara-negara ASEAN (Jaehyon Lee 2019).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengunjungi sejumlah proyek pembangunan infrastruktur dan proyek pengembangan kota pintar (smart city) dalam rangkaian kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) ke Korea Selatan. Menurut Menteri PUPR, beberapa kerja sama nyata telah dan akan dilaksanakan antara Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian PUPR dengan Pemerintah Korea Selatan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Agraria, Infrastruktur, dan Transportasi (MOLIT).

“Kementerian PUPR telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup Korea Selatan dan MOLIT sejak beberapa tahun lalu. Beberapa bentuk kerja samanya yakni pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Karian di Banten untuk penyediaan air baku di Jakarta bagian Barat, termasuk pembangunan *water treatment plan* dan jaringan distribusinya. Kemudian juga sedang dilakukan *feasibility study* untuk Semarang Smart Water System,” ujarnya (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022). Menurut Menteri PUPR, ada empat bentuk kerja sama nyata yang dibahas dan diputuskan dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo, khususnya yang mendorong pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) (HUMAS KEMENTERIAN PUPR/UN 2022).

“*Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA)” Menjadi salah satu aliansi ekonomi strategis yang dapat membuka peluang baru bagi perdagangan, investasi, dan perluasan ekonomi antara Korea Selatan dan Indonesia. Dengan peluncurannya saat 2012, “IK-CEPA” menandai dimulainya proses negosiasi yang panjang. Menjadi salah satu aliansi ekonomi strategis yang dapat membuka peluang baru bagi perdagangan, investasi, dan perluasan ekonomi antara Korea Selatan dan Indonesia. Dengan peluncurannya pada tahun 2012, IK-CEPA menandai dimulainya proses negosiasi yang panjang (Kementerian Perdagangan 2020).

Kerangka kerja kelembagaan yang komprehensif akan disusun oleh “IK-CEPA” selain upaya peningkatan dan penguatan sektor perdagangan dan investasi kedua negara untuk memperluas kerja sama bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan. Untuk memperhitungkan struktur ekonomi yang unik dari

masing-masing negara, IC-CEPA berfokus pada tiga pilar utama: 1) fasilitasi perdagangan dan investasi, 2) kerja sama ekonomi, dan juga 3) Akses pasar termasuk pengembangan kapasitas. Menurut “Direktorat Jenderal Negosiasi Perdagangan Bilateral (2021)” ini adalah prosedur yang memungkinkan suatu negara untuk berpartisipasi dalam pasar yang sudah ada. Prosedur yang memungkinkan suatu negara untuk berpartisipasi dalam pasar yang sudah ada dikenal sebagai akses pasar (Direktorat Jenderal Negosiasi Perdagangan Bilateral 2021). IK-CEPA ini memiliki kesepakatan komprehensif antara kedua Negara yang dapat dilihat melalui perdagangan jasa, investasi, asal penyediaan barang, dan kerja sama ekonomi.

Selain itu, dibandingkan dengan AKFTA, Korea dan Indonesia akan memiliki akses pasar yang lebih baik di bawah perjanjian IK-CEPA. Pada Juli 2012, Korea Selatan dan Indonesia memulai negosiasi IK-CEPA. Perdagangan barang, aturan asal barang, prosedur bea cukai dan fasilitasi perdagangan, jasa, investasi, kerja sama dan pembangunan kapasitas, masalah hukum dan kelembagaan, dll., semuanya ditangani oleh tujuh kelompok kerja IK-CEPA. “Direktorat Jenderal Negosiasi Perdagangan Bilateral, 2021”

Meskipun menghadapi sejumlah tantangan dalam hubungan ekonomi mereka, Korea Selatan dan Indonesia tetap menjadi dua mitra dagang terpenting di dunia. Pemilihan kepala negara baru di kedua negara tersebut secara langsung telah membawa perbaikan yang signifikan dalam hubungan antara kedua negara. Presiden Moon Jae-in dan Jokowi memutuskan untuk mengaktifkan kembali negosiasi IK-CEPA dalam rangka memperkuat hubungan bilateral pada saat peringatan 45 tahun hubungan Korea Selatan-Indonesia pada tahun 2018. Pada

tanggal 19 Februari 2019, menteri perdagangan kedua negara melanjutkan negosiasi IK-CEPA sebagai tindak lanjut (VOI 2020).

Perundingan IK-CEPA putaran kesepuluh, yang diadakan di Bali pada tanggal 8-10 Oktober 2019, menghasilkan kesepakatan antara Korea Selatan dan Indonesia. Konsensus ini menyebabkan negosiasi dianggap, secara prinsip, telah selesai. Lebih lanjut, kedua belah pihak sepakat bahwa kesimpulan dari perundingan IK-CEPA akan diproklamasikan secara bersama-sama pada saat pertemuan presiden kedua negara. Deklarasi Bersama tentang Kesimpulan Akhir Perundingan telah ditandatangani oleh para pihak dalam Perundingan IK-CEPA pada tanggal 25 November 2019, di Busan, Korea Selatan, pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-ROK. Selanjutnya, Korea dan Indonesia akan melanjutkan dengan pemurnian hukum bahasa perjanjian untuk mempercepat implementasi IK-CEPA (Septiari 2019).

New Southern Policy mengindikasikan fokus pemerintahan Moon pada potensi kemitraan masa depan antara ASEAN dan Korea. Dengan kata lain, berdasarkan hubungan dan kemitraan yang sudah ada, inisiatif ini bertujuan untuk memperdalam hubungan demi kepentingan bersama ASEAN dan Korea di masa depan. Perhatian Presiden Moon terhadap diversifikasi diplomatik merupakan latar belakang dari inisiatif ASEAN-nya. Diplomasi dan kebijakan luar negeri Korea sejauh ini secara tidak proporsional terfokus pada Semenanjung Korea dan empat mitra utama Korea (Yeo 2020).

Mereka berharap untuk mempromosikan serta meningkatkan hubungan dengan Asia Tenggara terutama Indonesia sebagai tanggapan atas meningkatnya kepentingan ekonomi dan strategis yang semakin meningkat. Akan tetapi saya

akan berfokus pada dampak dari new southern policy terhadap perekonomian Indonesia sejak Korea Selatan dan Indonesia memutuskan untuk memperkuat kerja sama mereka menjadi lebih lebih inklusif. Di antara negara-negara ASEAN, Korea Selatan Selatan memilih Indonesia sebagai mitra utama dalam kebijakan new southern policy karena potensi pasarnya yang besar (Noto 2021).

Selain itu, pemerintah Korea Selatan dan Indonesia juga terus meningkatkan investasi Korea Selatan di Indonesia melalui investasi Korea Selatan di Indonesia melalui Kebijakan Selatan Baru. Seperti yang telah disebutkan di atas, Korea Selatan berkeinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi baru di ASEAN. Perusahaan otomotif asal Korea Selatan, Hyundai Motor Company, telah mengeluarkan dana sebesar US\$ 1,55 miliar untuk membangun pabrik di Indonesia menjadi negara di ASEAN yang menjadi pusat penelitian dan pengembangan bagi Hyundai. Kapasitas produksi pabrik ini mencapai 150.000 unit per tahun dan 250.000 unit per tahun untuk kapasitas maksimumnya. Sementara ini perusahaan ini akan menyediakan lapangan kerja sebanyak 2000 orang tenaga kerja (Kementerian Investasi/BKPM 2022).

BAB 3

KEMITRAAN STRATEGIS OLEH KEDUA NEGARA

3.1. Perjanjian dan Deklarasi Bilateral yang Disepakati

Presiden Joko Widodo mengunjungi Busan, Korea Selatan, pada tahun 2014 sebagai bagian dari kunjungan bilateral. Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Park Geun-hye dan menekankan pentingnya Indonesia sebagai mitra strategis bagi Korea Selatan. Beberapa kesepakatan dicapai sebagai hasil dari kunjungan bilateral tersebut. Korea Selatan terlibat dalam pembangunan Satuan Penjaga Pantai dan galangan kapal di Indonesia; kedua negara sepakat untuk menandatangani Persetujuan Pembentukan Komite Bersama di bidang e-government dan reformasi birokrasi; Presiden Joko Widodo mendukung perdamaian dan stabilitas regional dan global, termasuk di Semenanjung Korea; perjanjian yang disetujui oleh presiden kedua negara, seperti pembentukan kembali Pertemuan Komisi Bersama (JCM) di tingkat menteri luar negeri, yang melacak kemajuan kerja sama dan menindaklanjuti kesepakatan yang disetujui di tingkat pemimpin; dan meningkatkan kerja sama pertahanan, khususnya proyek pesawat tempur dan kapal selam (Siti Hidriyah 2017).

Bisa dikatakan bahwa hubungan antara Korea Selatan dan Indonesia telah diwarnai dengan pasang surut sejak kontak konsulat didirikan pada tahun 1966 dan hubungan diplomatik didirikan pada tahun 1973. Pada tahun 1973, hubungan diplomatik didirikan. Pada awalnya, sulit untuk menggambarkan hubungan kedua negara sebagai hubungan yang memuaskan. Lingkungan internasional, yang

masih diwarnai oleh Perang Dingin, berdampak pada politik masing-masing negara.

Sejak terpilih menjadi presiden Korea Selatan untuk periode 2017-2022 Moon Jae In sendiri telah memiliki kerjasama yang signifikan terhadap negara kita yaitu, Indonesia. Dengan menggunakan *New Southern Policy* yang didasarkan dengan teori kemitraan strategis membuat ketertarikan tercipta oleh kedua negara untuk menjalin kerjasama. Penandatanganan kerjasama melalui *Strategic Partnership* antara Indonesia dan Korea Selatan secara resmi terjadi pada November 2017, bertepatan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Moon Jae-in ke Indonesia. Dalam tulisan ini ingin berfokus pada dampak dari Kebijakan Selatan Baru terhadap perekonomian Indonesia sejak Korea Selatan dan Indonesia memutuskan untuk memperkuat kerja sama mereka menjadi lebih inklusif. Di antara negara-negara ASEAN, Korea Selatan memilih Indonesia sebagai mitra utama dalam Kebijakan Selatan Baru karena potensi pasar yang besar (Suoneto 2021).

New Southern Policy memiliki tujuan untuk memperluas cakrawala ekonomi Korea Selatan di tengah meningkatnya proteksionisme melalui diversifikasi ekonomi (Kedutaan Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia, 2021). Terdapat beberapa bentuk kerjasama internasional, yaitu bilateral, multilateral, dan regional. Namun, dalam hal ini penulis ingin memfokuskan pembahasan pada kerja sama bilateral. Menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyang Mochamad Yani, ada tiga motif yang dicari oleh dua negara ketika melakukan hubungan bilateral. Ketiga motif tersebut adalah

menjaga kepentingan nasional, menjaga perdamaian, dan meningkatkan kemakmuran ekonomi.

Sebelumnya, Korea Selatan telah memiliki hubungan antara “Indonesia serta negara-negara ASEAN” dengan penandatanganan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Korea (AKFTA) pada bulan Agustus 2006. Integrasi ekonomi Asia Tenggara diperkuat dan diperdalam sebagai hasil dari pengurangan substansial hambatan perdagangan tarif dan nontarif antara Korea Selatan dan negara-negara ASEAN melalui AKFTA. Akibatnya, pada Februari 2011, Korea Selatan dan Indonesia sepakat untuk membentuk Kelompok Studi Bersama (KSB) guna menyelidiki kemungkinan pembentukan perjanjian perdagangan bebas bilateral (FTA) menurut “Direktorat Jenderal Negosiasi Perdagangan Bilateral 2021”.

Sementara itu, kesepakatan Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) diselesaikan pada 25 November 2019 di Busan, Korea Selatan, bertepatan dengan peringatan 30 tahun kemitraan ASEAN–Korea. Kesepakatan ini ditandatangani secara resmi pada 18 Desember 2020 melalui pertemuan virtual oleh Menteri Perdagangan Indonesia Agus Suparmanto dan Menteri Perdagangan Korea Selatan Yoo Myung-hee, dan mulai berlaku pada 1 Januari 2023. IK-CEPA merupakan perjanjian ekonomi komprehensif yang mencakup penghapusan tarif terhadap lebih dari 90% produk ekspor dari kedua negara, sekaligus memperkuat investasi, perlindungan investor, transfer teknologi, dan kerja sama di bidang industri kreatif, ekonomi digital, serta pengembangan sumber daya manusia. Perjanjian ini juga dianggap sebagai implementasi nyata dari visi Korea Selatan dalam New Southern Policy (NSP)

yang bertujuan memperdalam hubungan dengan negara-negara ASEAN (Dian Septiari 2019).

Selain meningkatkan dan memperkuat sektor perdagangan dan investasi kedua negara, IK-CEPA akan menciptakan kerangka kerja institusional yang menyeluruh untuk memperluas kerja sama bilateral antara Korea Selatan dan Indonesia. Mengingat struktur ekonomi masing-masing negara yang unik, IK-CEPA memberikan penekanan yang kuat pada gagasan tiga pilar utama: 1) akses pasar; 2) fasilitasi perdagangan dan investasi; dan 3) kerja sama ekonomi, termasuk pengembangan kapasitas. Prosedur yang memungkinkan suatu negara untuk terlibat dalam pasar yang sudah mapan dikenal sebagai akses pasar (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Bilateral 2021).

IK-CEPA merupakan bukti bahwa kedua negara siap untuk memperkuat hubungan keuangan mereka di tengah kondisi ekonomi global yang sulit saat ini. Perjanjian IK-CEPA bertujuan untuk mempromosikan kerja sama ekonomi yang luas dan saling menguntungkan antara Korea dan Indonesia. Memfasilitasi pertumbuhan perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi saat ini antara kedua negara dapat membantu mencapai hal ini. Ekonomi kedua negara akan berkembang sebagai hasilnya, dan kemitraan ini akan mendapatkan keuntungan dari integrasi ekonomi kedua negara yang semakin meningkat (Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Bilateral 2021).

Berdasarkan tulisan Vidya Nadkarni, hal ini tercermin dalam perjanjian kemitraan strategis khusus yang ditandatangani Korea Selatan dan Indonesia pada tahun 2017, serta berbagai bentuk kerja sama konkret seperti IK-CEPA. Perjanjian ini tidak hanya menasar perdagangan dan investasi, tetapi juga menekankan

penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas, yang menunjukkan adanya pendekatan institusional dalam kerja sama bilateral. Bagi Nadkarni, penguatan institusi bersama merupakan strategi negara menengah untuk menciptakan stabilitas dan memperkuat posisi mereka dalam sistem internasional yang tidak selalu berpihak pada Negara yang tidak memiliki dominasi kekuasaan secara global (*non-hegemonik*).

Selain itu, hubungan bilateral ini juga mencerminkan rasionalitas negara dalam menjaga kepentingan nasional mereka melalui kemitraan ekonomi dan politik yang saling menguntungkan. Indonesia memanfaatkan kerja sama ini untuk memperluas akses teknologi, mendorong investasi, serta mendapatkan manfaat dalam bentuk peningkatan kapasitas industri dan sumber daya manusia. Sementara itu, Korea Selatan menggunakan pendekatan ini untuk memperluas pengaruh ekonominya dan mengurangi ketergantungan terhadap pasar tradisional di tengah meningkatnya proteksionisme global. Hubungan yang terjalin bukanlah relasi yang timpang, tetapi mencerminkan simbiosis strategis yang didasarkan pada kebutuhan masing-masing negara dalam merespons tantangan global.

3.2. Mekanisme Pertemuan Tingkat Tinggi antara Korea Selatan-Indonesia

Dimulai dengan Kebijakan Selatan Baru (New Southern Policy/NSP) yang diperkenalkan pada tahun 2017 dan dilanjutkan di bawah Korea-ASEAN Solidarity Initiative (KASI) bersama dengan Strategi Indo-Pasifik yang diumumkan pada tahun 2022, Korea Selatan secara bertahap meningkatkan dan mengintensifkan kerja sama di berbagai sektor dengan Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya, termasuk di bidang pertahanan dan keamanan (Kenzie Sultan Ryvantya 2024).

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan telah berkembang pesat di berbagai bidang sejak hubungan tersebut secara resmi didirikan pada bulan September 1973. Namun, sebagian besar perhatian populer dan akademisi di Indonesia masih terkonsentrasi pada aspek ekonomi dan sosiokultural dari hubungan bilateral, termasuk ketertarikan masyarakat Indonesia yang sangat besar terhadap produk konsumen Korea, budaya pop, tujuan wisata, dan peluang pendidikan. Hal ini sebagian disebabkan oleh Hallyu atau “Korean Wave”, sebuah fenomena yang terjadi sejak tahun 1990-an di mana popularitas global (Kenzie Sultan Ryvantya 2024).

Dalam praktiknya, Indonesia berfokus pada tiga agenda, yaitu membangun kepercayaan diri, memanfaatkan kemampuan militer, dan mengembangkan basis industri pertahanan dalam negeri (Gindarsah 2015). Buku Putih Pertahanan 2008 yang diperbarui pada tahun 2008 lebih lanjut menetapkan diplomasi pertahanan Indonesia sebagai diplomasi pertahanan tiga lapis: lapisan pertama adalah hubungan militer-tomiliter dengan negara-negara ASEAN; lapisan kedua melibatkan kerja sama militer dengan kekuatan eksternal, termasuk Korea Selatan; dan lapisan ketiga adalah pengerahan kekuatan dalam operasi penjaga perdamaian PBB (Gindarsah 2015).

Pola penting dalam diplomasi pertahanan Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya melibatkan jaringan multilateral yang berpusat pada mekanisme yang dipimpin ASEAN untuk mempromosikan kerja sama keamanan (Kementerian Perdagangan 2020).

Hubungan bilateral tidak hanya retorikal, tetapi benar-benar diwujudkan dengan pengesahan CEPA dan elevasi status hubungan menjadi *Special Strategic*

Partnership pasca kunjungan kenegaraan Moon ke Indonesia pada tahun 2017 dan kunjungan balik Jokowi ke Korea pada tahun 2018. Selain itu, disebutkan pula pengakuan atas peran Korea dalam proyek infrastruktur —termasuk penghargaan dari JakPro terhadap pelaksanaan LRT Jakarta oleh Korean Railway Facility—menggambarkan sinergi nyata NSP dalam sektor pembangunan (Kocis 2019).

Dilihat kembali dalam situs resmi Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, yang dipublikasikan sekitar 26 November 2019, merangkum hasil pertemuan antara Presiden Moon Jae-in dengan Presiden Joko Widodo di sela Konferensi Tingkat Tinggi Khusus ASEAN–Korea. Moon Jae-in menekankan bahwa pengalaman Korea dalam memindahkan ibu kota ke Sejong City dan pengembangan kota pintar dapat berperan penting dalam proyek relokasi ibu kota Indonesia, yang disambut positif oleh Presiden Jokowi (Ministry of Foreign Affairs 2019).

Pemerintah Indonesia dan pemerintah Korea Selatan telah menandatangani perjanjian kerja sama di bidang pertahanan pada february 2022, pertemuan mereka membahas peluncuran prototipe pesawat tempur KF-21/IF-X di Korea Selatan, yang juga dihadiri oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai wakil Indonesia dalam kerja sama pertahanan kedua negara serta Moon Jae In sebagai presiden Korea Selatan (Kocis 2021)

Dalam kunjungan resmi Presiden Joko Widodo ke Korea Selatan pada November 2019, yang didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Indonesia dan Korea Selatan menyepakati sejumlah kerja sama strategis di bidang ekonomi, investasi, dan pembangunan.

Pertemuan ini berlangsung dalam rangka *ASEAN-Korea Commemorative Summit* dan menghasilkan beberapa kesepakatan penting yang memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Dalam pembahasan ini membahas Penyelesaian Perundingan IK-CEPA, investasi strategis melalui investasi Hyundai Motor senilai *US\$1,5* miliar di Indonesia. Selain itu, didorong pula realisasi investasi dari LG Chem di industri baterai lithium dan LG International di sektor makanan, minuman, serta *Internet of Things (IoT)*, Penandatanganan Tiga Dokumen Kerja Sama: (Joint Declaration on the Final Conclusion of the *Negotiations of the Republic of Korea – Republic of Indonesia Comprehensive Economic Partnership (CEPA)*), perjanjian bebas visa bagi pemegang Paspor Diplomatik dan dinas Indonesia-Korea, (*MoU Concerning Technical Cooperation on Capital City Relocation and Development*), serta peningkatan Kerja Sama Regional dan Global melalui G20 (Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia 2019).

Pertemuan tingkat tinggi atau High-Level Summit antara Indonesia dan Korea Selatan yang berlangsung pada 25 November 2019 di Busan, Korea Selatan, merupakan salah satu tonggak penting dalam hubungan bilateral kedua negara. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangkaian ASEAN–Republic of Korea Commemorative Summit, yang memperingati 30 tahun kemitraan ASEAN–Korea. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo dan Presiden Moon Jae-in sepakat untuk memperkuat kerja sama strategis khusus melalui berbagai inisiatif konkrit, yang secara langsung sejalan dengan visi New Southern Policy (NSP) Korea Selatan. Beberapa hasil utama dari pertemuan ini meliputi selesainya perundingan Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership

Agreement (IK-CEPA), yang kemudian ditandatangani pada 2020, dan kesepakatan peningkatan investasi Korea di berbagai sektor strategis Indonesia seperti infrastruktur, manufaktur, dan ekonomi digital (Kim Sooyeon 2019).

Dalam pertemuan selanjutnya memiliki tujuan untuk menanyakan lebih lanjut mengenai hasil pertemuan HLDI (yang diadakan di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 23 Maret 2023) seperti yang dilaporkan dalam Catatan Diskusi. Koordinasi antar instansi pemerintah terkait pembuatan peraturan dan perizinan untuk kolaborasi Indonesia-Korea Selatan di bidang infrastruktur, industri, kesehatan, dan kemaritiman dimulai pada hari pertama. Pemerintah daerah turut ambil bagian dalam mengkomunikasikan kondisi dan prospek investasi di daerahnya kepada perusahaan-perusahaan Korea Selatan, selain kementerian dan lembaga di tingkat pusat.

Korea Selatan menjadi salah satu negara dengan nilai investasi terbanyak di Indonesia dengan total investasi sebesar US\$1,66 miliar di tahun 2022. Asdep Ferry menyampaikan investasi Korea Selatan memiliki dampak yang baik bagi iklim bisnis dan perekonomian Indonesia.

3.3 Kerjasama Militer dan Pertahanan-Kemampuan Korea Selatan-Indonesia

Kolaborasi pengembangan dan pembuatan pesawat tempur KFX/IFX adalah salah satu contoh yang terkenal. Dengan latar belakang kemandirian industri pertahanan kedua negara, Indonesia dan Korea Selatan memiliki inisiatif kerja sama antarpemerintah yang disebut Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX) yang berfokus pada produksi pesawat tempur bersama. Kemampuan pesawat tempur siluman generasi kelima ini hampir sama dengan KFX/IFX, pesawat tempur generasi ke-4,5 (Marina Ika Sari 2021).

Indonesia memutuskan untuk bekerja sama dengan Korea Selatan untuk membuat pesawat tempur KFX/IFX dalam rangka mencapai kemandirian dalam industri pertahanan. Hal ini disebabkan oleh penekanan perjanjian bahwa Korea Selatan tidak keberatan jika Indonesia menerima teknologinya, yang meningkatkan margin keuntungan Indonesia dari kemitraan tersebut. Pada awalnya, para insinyur dan ilmuwan Indonesia mengerjakan prototipe pesawat tempur KFX/IFX sebagai bagian dari transfer teknologi. Kabarnya, PT Dirgantara Indonesia dan pemerintah Indonesia telah menyiapkan antara 200 hingga 300 tenaga profesional untuk berpartisipasi dalam upaya militer besar-besaran ini. Jumlah tenaga ahli yang banyak ini akan datang ke Korea Selatan secara bertahap selama 10 tahun kedepan (Andy 2021).

Indonesia dan Korea Selatan dalam melakukan kerjasama mengedepankan skema alih teknologi dalam rangka mendukung kemandirian dan kemajuan industri serupa di seluruh negeri, terutama karena pertumbuhan PT PAL Indonesia. Sejumlah hambatan dan kesulitan ada dalam memperluas kolaborasi kapal selam, terutama mengingat kapasitas PT PAL Indonesia yang terbatas untuk memproduksi kapal selam DSME 209/1400. Alasan terbatasnya kemampuan tersebut adalah karena Indonesia belum memiliki kapasitas untuk merancang kapal selam dan saat ini belum memiliki fasilitas dan infrastruktur terbaik untuk pemeliharaan, perbaikan, dan operasi pembuatan kapal selam PT PAL (Guntur Eko Saputro 2022).

Pesawat tempur KFX/IFX dilengkapi dengan berbagai sistem persenjataan mutakhir, termasuk sistem radar yang dapat melacak pergerakan musuh dari berbagai sudut dan kapasitas untuk menghancurkan sistem elektronik musuh.

Sebanyak 168 pesawat tempur KFX/IFX akan diproduksi oleh Korea Selatan dan Indonesia, dengan 48 unit untuk Indonesia dan 120 unit untuk Korea Selatan. Dengan perkiraan total biaya produksi sebesar 7,8 miliar dolar AS, pesawat tempur KFX/IFX akan diproduksi dalam tiga tahap: pengembangan teknologi atau ide, pengembangan prototipe, dan produksi massal. Pengaturan pembagian biaya menyatakan bahwa pemerintah Indonesia akan membayar 20%, Korea Aerospace Industries Co (KAI) akan membayar 20%, dan pemerintah Korea Selatan akan membayar 60% (Marina Ika Sari 2021).

Pertemuan Tingkat Tinggi Pejabat Tinggi Urusan Luar Negeri dan Pertahanan (2+2 SOM) ke-2 diadakan di Seoul, Korea Selatan, pada tanggal 28 Oktober 2022, yang semakin memperkuat Kemitraan Strategis antara Korea Selatan dan Indonesia. Rodon Pedrason, Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Ditjen Strahan Kemhan RI), dan Ditjen Aspasaf Kemlu RI, Direktur Jenderal Asia-Pasifik dan Afrika di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, berkesempatan untuk membahas kerja sama pertahanan antara kedua negara saat ini dan di masa depan, serta berbagi pendapat mengenai hal-hal strategis yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2022).

Kegiatan 2+2 SOM RoK-RI meliputi kunjungan delegasi Indonesia ke Zona Demiliterisasi (DMZ), yang membatasi perbatasan sepanjang 249 kilometer antara kedua Korea, pertemuan 2+2 dengan Direktur Jenderal Pertahanan dan Urusan Luar Negeri RoK, pertemuan bilateral dengan mitra masing-masing, dan kunjungan kehormatan kepada Duta Besar Indonesia untuk Seoul. Lanjutan kerja sama industri pertahanan, kerja sama keamanan di bidang keamanan siber, operasi

pemeliharaan perdamaian, keamanan maritim, dan kontra-terorisme, serta pertukaran pandangan mengenai isu-isu regional, terutama di kawasan Indo-Pasifik, akan menjadi topik utama pembahasan selama kegiatan ini (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2022).

Komite Kerja Sama Pertahanan Bersama (JDCC) antara Republik Indonesia dan Republik Korea, yang direncanakan akan dibentuk pada tahun 2023, menjadi topik pembahasan lain antara Republik Korea dan Kementerian Pertahanan Indonesia mengenai peningkatan kerja sama pertahanan. Selain itu, komitmen Indonesia dalam mempromosikan perdamaian dan keamanan di Semenanjung Korea ditunjukkan melalui kunjungan ke Zona Demiliterisasi (DMZ) (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2022).

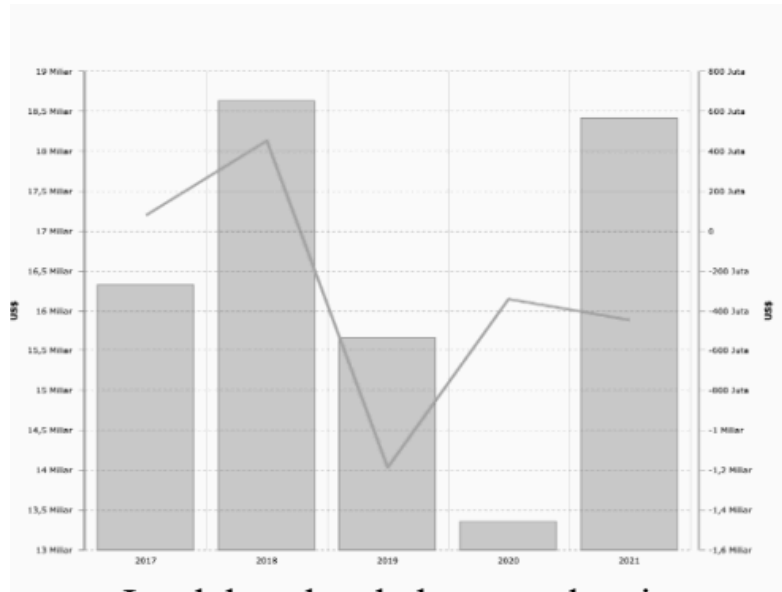
3.4 Kerjasama Ekonomi dalam format IK-CEPA

Presiden mengutarakan kepuasannya terhadap perkembangan hubungan Republik Korea-Indonesia, dengan mengutip kerja sama konkret yang terwujud sebagai hasil dari kunjungan ini. “Upaya memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan menjadi semakin penting di tengah situasi yang sulit seperti ini,” pikirnya. Pembahasan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) telah selesai pada saat itu, dan Presiden Jokowi menyampaikan harapannya agar perjanjian tersebut dapat ditandatangani pada awal tahun 2020 “IK-CEPA adalah simbol komitmen kedua negara dalam keterbukaan ekonomi dan dalam konteks kawasan meskipun saya berharap dapat ditandatangani tahun depan,” kata Presiden Jokowi. Sebelumnya Presiden Korsel Moon Jae-in dalam sambutannya mengaku senang sekali dapat bertemu lagi dengan melihat Presiden Jokowi di Busan, kampung halaman dirinya. “Sekali

lagi, saya menyampaikan ucapan selamat yang tulus kepada Yang Mulia atas pelantikan kembali sebagai Presiden Republik Indonesia,” kata Presiden Moon (Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 2019).

Moon Jae In selaku presiden meyakini Indonesia akan berkembang sevcara meningkat di bawah kepemimpinan sifat toleransi Presiden Jokowi sebagai perwakilan antar negara yang melambangkan hubungan kerjasama. Ia juga menilai, di antara negara-negara ASEAN, Indonesia adalah negara satu-satunya menjalin mitra strategis khusus bersama Korsel. “Kedua negara telah membangun hubungan bilateral yang lebih erat daripada tahun sebelumnya dan kita setiap tahun mengadakan pertemuan puncak untuk mengembangkan hubungan akrab dan khusus antara kedua negara. Kedua negara telah menjalin menjadi negara yang saling memerlukan dalam kemakmuran bersama,” kata presiden Moon. Menurut Moon Jae In, nilai perdagangan antara Korea Selatan dan Indonesia mencapai US\$20 miliar pada tahun lalu. Presiden Moon kini optimis bahwa angka perdagangan ini akan meningkat lebih lanjut seiring dengan selesainya negosiasi IK-CEPA (Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 2019).

Grafik 1. Nilai dan Neraca Perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan (2017-2022) (Dhini (2022))



Dalam implementasinya dapat diambil contoh seperti yang dikatan oleh, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan bahwa implementasi perjanjian ini akan berpotensi meningkatkan lalu lintas perdagangan antara kedua negara. Demi mendukung kerja sama tersebut, dalam perjanjian ini Korea akan meliberalisasi sebanyak 95,5% dari total 12.232 pos tarifnya, sedangkan Indonesia akan meliberalisasi 92% dari total 10.813 pos tarifnya (Kementerian Keuangan Direktorat Bea Cukai 2023).

3.5 Kerjasama budaya dan pertukaran pelajar/mahasiswa/i antara Korea Selatan-Indonesia

Kerjasama dalam hal budaya dan juga pertukaran pelajar/mahasiswa antara kedua negara ialah IKYEP atau biasa dikenal dengan *Indonesia-Korea Youth Exchange Program*. Indonesia – Korea Youth Exchange Program (IKYEP)

atau Pertukaran Pemuda Indonesia – Korea (PPIKor) adalah program pertukaran pemuda yang dijalankan oleh Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga Republik Korea dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (IKYEP 2023). Kedua kementerian menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pada tahun 2009. Pertukaran pemuda pertama antara kedua negara berlangsung pada tahun 2010 (IKYEP 2023).

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bertanggung jawab untuk mengatur dan melaksanakan program pertukaran pemuda. Pusat Pertukaran Pemuda Korea melaksanakan program pertukaran pemuda ini selama berada di Korea (IKYEP 2023). Delegasi Program Pertukaran Pemuda Indonesia-Korea (IKYEP) 2023 melakukan kunjungan kehormatan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) di Graha Media Center Kemenpora. Peserta PPIKor berjumlah 50 orang, 25 orang dari Korea dan 25 orang dari Indonesia (Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia 2023).

Hadir dalam kegiatan ini Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora Asrorun Ni'am Sholeh, Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Komunikasi dan Hubungan Internasional Alia Noorayu Laksono, Asisten Deputi Kemitraan Pemuda Khairil Adha, serta selebritis Aldi Taher (Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia 2023).

Menpora Dito menyapa para pemuda Korea Selatan yang berpartisipasi dalam program ini dan menyambut baik kedatangan para peserta PPIKor. Ia berpesan kepada para peserta dari Indonesia untuk menjalin persahabatan baru dengan orang Korea sebagai jaringan dan sebagai teman untuk pengembangan

diri."Jejaring yang terbentuk dalam pertukaran pemuda ini biasanya bisa membuka cara berpikir kita dan cara menganalisa dalam suatu hal, menyikapi masalah ini dalam budaya berbeda. Dan itu yang bisa membuat diri kita berbeda dari yang lain di jalur yang positif," papar Menpora Dito Ariotedjo (Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia 2023).

Salah satu contoh lainnya adalah pengumuman resmi tentang hubungan strategis baru antara Universitas Nasional Pukyong (PKNU) Korea Selatan dan Universitas Negeri Semarang (UNNES) Indonesia, yang bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara. Fase awalnya adalah Forum Diskusi Kelompok (FGD) di Hotel Tentrem Semarang, yang melibatkan kedua lembaga pendidikan tersebut dan 17 perguruan tinggi negeri (PTN) Indonesia (Dwi Hermawan 2023).

Perwakilan dari universitas negeri Indonesia dan delegasi dari kedua universitas berbagi pandangan dan pengalaman dalam Forum Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) tentang penelitian, pendidikan, dan pertukaran mahasiswa antara kedua negara. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kolaborasi akademik dan memperkuat pertukaran pengetahuan serta budaya antara Korea Selatan dan Indonesia (Dwi Hermawan 2023).

Peserta dalam FGD membahas sejumlah topik penting, seperti pembentukan program pertukaran mahasiswa, kerja sama tim dalam penelitian, dan pertukaran pengetahuan antara dosen dan mahasiswa. Selain itu, tindakan spesifik untuk meningkatkan kolaborasi ini juga dicatat, seperti meningkatkan mobilitas mahasiswa, fakultas, dan staf di antara kedua negara, membuat rencana

studi kolaboratif, dan menjadi tuan rumah seminar internasional (Dwi Hermawan 2023).

Pada akhir FGD, para peserta memutuskan untuk terus meningkatkan kolaborasi bilateral Korea Selatan-Indonesia. Mereka berharap bahwa pertukaran akademis dan budaya kedua negara akan semakin meningkat dan mencakup bidang yang lebih luas, seperti sains, teknologi, seni, dan olahraga (Dwi Hermawan 2023).

Hingga Juni 2019, terdapat 180 King Sejong Institutes (KSI) di 60 negara di seluruh dunia, termasuk empat di Indonesia, menurut situs web KSIF. Tiga dari institusi tersebut berada di Jakarta, sementara satu di Surabaya. Keempat institusi di Indonesia terdiri dari beberapa kategori KSI. KSI Surabaya merupakan kolaborasi antara Universitas Dongseo (Korea Selatan) dan Universitas Petra (Indonesia). Tanggal 10 Agustus 2015 menandai berdirinya KSI Surabaya. Di Jakarta, ada dua jenis KSI yang berbeda (KSIF 2018).

Aturan lembaga pengawas diikuti dalam pengelolaan KSI tipe konektif. KSI ini umumnya hanya mengubah kurikulum KSIF; dalam hal lain, mereka beroperasi sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh lembaga pengawas masing-masing. Sebagai perwakilan KSIF di Indonesia, Pusat KSI (KSIC) adalah KSI independen yang didirikan melalui keputusan langsung dari kantor pusat KSIF (KSIF 2018).

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Indonesia mengalami penguatan yang signifikan selama masa kepemimpinan Presiden Moon Jae In (2017–2022). Hal ini tak lepas dari inisiatif kebijakan luar negeri yang dikenal sebagai *New Southern Policy* (NSP), yang menjadi kerangka utama strategi Korea Selatan dalam memperdalam hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara dan India. Melalui pendekatan ini, Korea Selatan mengarahkan fokus politik, ekonomi, dan sosial-budayanya secara lebih intensif terhadap kawasan ASEAN, menjadikan Indonesia sebagai mitra utama. Dalam skripsi ini, hubungan kedua negara dianalisis melalui pendekatan teori kemitraan strategis (*strategic partnership*) dari Vidya Nadkarni, yang menekankan pentingnya keterlibatan formal, mekanisme kelembagaan, dan kerjasama multiaspek antara negara-negara yang tidak terikat dalam aliansi militer tradisional.

Kebijakan Selatan Baru lahir dari kebutuhan domestik Korea Selatan untuk melakukan diversifikasi diplomatik dan ekonomi dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik. Moon Jae In melihat peluang besar di ASEAN sebagai mitra strategis yang belum dimaksimalkan sepenuhnya oleh Korea Selatan sebelumnya. Indonesia dipilih sebagai mitra utama bukan hanya karena faktor demografi dan potensi ekonominya, tetapi juga karena stabilitas politiknya serta posisi sentralnya dalam ASEAN. Di bawah kerangka NSP,

Moon Jae In membawa hubungan kedua negara ke tingkat kemitraan yang lebih terstruktur, komprehensif, dan multidimensi.

Dalam aspek politik, kemitraan antara Indonesia dan Korea Selatan diperkuat dengan kunjungan kenegaraan, pertemuan puncak bilateral tahunan, serta penandatanganan sejumlah nota kesepahaman. Moon Jae In secara langsung meluncurkan NSP saat kunjungannya ke Indonesia pada November 2017. Ia menyatakan keinginannya untuk menyejajarkan hubungan dengan ASEAN seperti halnya dengan mitra tradisional Korea lainnya, yakni Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan Rusia. Dialog bilateral yang intens antara Presiden Moon dan Presiden Joko Widodo mencerminkan tingkat saling percaya yang tinggi serta komitmen politik jangka panjang yang kuat. Penyusunan kerangka kerja seperti *Joint Defence Cooperation Committee* (JDCC) juga menunjukkan bahwa kerja sama keamanan pun menjadi bagian penting dalam agenda strategis ini.

Secara ekonomi, hubungan kedua negara mencatatkan berbagai kemajuan berarti. Implementasi Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) menjadi salah satu tonggak penting dalam hubungan bilateral. Dimulai sejak 2012 dan sempat terhenti pada 2014, negosiasi IK-CEPA diaktifkan kembali di era Moon dan berhasil diselesaikan pada 2019. Perjanjian ini bukan hanya mencakup sektor perdagangan dan investasi, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas, kerjasama hukum, dan ketentuan asal barang. Volume perdagangan kedua negara meningkat signifikan, dan sektor investasi menyaksikan keterlibatan perusahaan besar

Korea seperti Hyundai, Samsung, dan LG di berbagai proyek di Indonesia, termasuk pembangunan pabrik mobil listrik, proyek energi, dan transportasi. Hal ini sejalan dengan pilar “Prosperity” dalam NSP yang menekankan pada kemakmuran bersama melalui integrasi ekonomi yang mendalam. Kemudian presiden Korea Selatan Moon Jae In dalam pertemuannya dengan presiden Indonesia Joko Widodo pada tanggal 9 november 2017 mengatakan bahwasannya “Indonesia adalah peng-ekspor industri pertahanan dan ketahanan terbesar di Asia Tenggara”.

Dari sisi kebudayaan, kerja sama antarwarga dan pertukaran budaya menjadi komponen penting yang memperkuat hubungan people-to-people. Program seperti Indonesia-Korea Youth Exchange Program (IKYEP) serta meningkatnya kolaborasi dalam bidang seni, musik, dan media menunjukkan bahwa hubungan tidak hanya berjalan di tingkat pemerintahan, tetapi juga menyentuh lapisan masyarakat secara luas.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa hubungan Indonesia dan Korea Selatan di era Moon Jae In mencerminkan contoh sukses dari implementasi teori kemitraan strategis dalam konteks hubungan bilateral modern. Melalui pendekatan yang menyeluruh – mencakup aspek politik, ekonomi, keamanan, dan sosial budaya – kedua negara telah membentuk hubungan yang tidak hanya stabil, tetapi juga berkembang secara dinamis dan berkelanjutan. Indonesia memperoleh manfaat besar dari peningkatan investasi, alih teknologi, dan konektivitas regional, sementara Korea Selatan

berhasil memperluas pengaruh geopolitiknya di Asia Tenggara, khususnya dalam konteks strategi diversifikasi mitra internasionalnya.

Dengan berakhirnya masa jabatan Moon Jae In, tantangan selanjutnya adalah mempertahankan dan mengembangkan capaian yang telah diraih, serta memastikan bahwa pemerintahan Korea berikutnya tetap memberikan prioritas terhadap hubungan dengan Indonesia. Keberlanjutan ini akan sangat bergantung pada komitmen politik kedua negara, serta kemampuan untuk terus menyesuaikan kemitraan strategis ini dengan dinamika global yang terus berubah.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan Korea Selatan dan Indonesia pada era Presiden Moon Jae In dalam bingkai teori kemitraan strategis, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk memperkuat dan mempertahankan kerja sama bilateral yang telah terbangun. Pertama, diperlukan penguatan keberlanjutan dari proyek-proyek yang telah disepakati selama pemerintahan Moon, terutama proyek strategis seperti IK-CEPA dan pengembangan pesawat tempur bersama KF-21/IF-X. Pemerintah Indonesia perlu memastikan bahwa komitmen dalam proyek tersebut tetap dijaga, baik dari sisi teknis maupun pendanaan, agar kerja sama tidak terhambat akibat perubahan pemerintahan atau dinamika politik domestik.

Kedua, Indonesia diharapkan dapat memperluas kerja sama ekonomi ke sektor-sektor strategis yang belum terlalu terjamah, seperti teknologi digital, energi terbarukan, dan industri kreatif. Mengingat Korea Selatan memiliki

keunggulan dalam inovasi dan teknologi, kemitraan di bidang ini dapat mendorong transformasi digital dan peningkatan daya saing industri nasional. Pemerintah dapat memfasilitasi dialog antara pelaku industri kedua negara melalui forum ekonomi tahunan atau business matching yang lebih terstruktur.

Ketiga, kerja sama pendidikan dan pertukaran budaya perlu terus ditingkatkan melalui program beasiswa, pertukaran mahasiswa, dan kolaborasi antaruniversitas. Interaksi antargenerasi muda dari kedua negara merupakan investasi sosial jangka panjang yang akan memperkuat hubungan bilateral secara emosional dan kultural. Selain itu, dibutuhkan promosi aktif dari nilai-nilai budaya lokal Indonesia di Korea Selatan agar hubungan tidak bersifat satu arah.

Keempat, pemerintah Indonesia perlu lebih aktif dalam memanfaatkan forum bilateral seperti Korea–Indonesia Joint Committee dan Special Strategic Partnership Dialogue sebagai wadah evaluasi berkala dan perumusan agenda bersama. Untuk itu, dibutuhkan sinergi lintas kementerian dan pemangku kepentingan agar diplomasi ekonomi, budaya, dan pertahanan dapat berjalan secara simultan dan tidak terfragmentasi.

Kelima, peneliti dan akademisi Indonesia diharapkan dapat mengambil peran lebih besar dalam mengkaji secara kritis dan konstruktif arah hubungan bilateral kedua negara. Kajian akademik seperti skripsi ini dapat menjadi masukan penting bagi pembuat kebijakan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan ekosistem riset yang mendukung kajian hubungan luar negeri dan diplomasi strategis, termasuk dukungan dari pemerintah dalam bentuk hibah penelitian atau kerja sama dengan lembaga riset luar negeri.

Oleh karena itu, dilihat dari perubahan kepemimpinan di kedua negara setelah masa jabatan Moon Jae In, diperlukan mekanisme transisi kerja sama yang adaptif dan fleksibel, agar proyek-proyek strategis tetap relevan dan tidak hanya menjadi simbolis semata. Nilai-nilai dasar kemitraan strategis harus terus dijaga, yakni saling percaya, saling menguntungkan, dan berorientasi jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachman & Prakoso. 2017. “Peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular.” *TRANSBORDERS: International Relations Journal* 1 1:20-34.
- Devi Anggraeni Poetr et al. 2018. “International Journal of East Asian Studies.” *REPUBLIC OF KOREA - INDONESIA RELATIONS: MIDDLE POWER DIPLOMACY IN EAST ASIA* 7 (1): 59-77.
- Dian Septiari. 2019. “Indonesia, South Korea Conclude CEPA Talks.” *The Jakarta Post*, November 26, 2019. <https://www.thejakartapost.com/news/2019/11/26/indonesia-south-korea-conclude-cepa-talks.html>.
- Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Bilateral. 2021. “IK-CEPA: Langkah Strategis Perkuat Hubungan Bilateral Indonesia-Korea ke Tahap yang Lebih Tinggi.” <https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/berita/detail/ik-cepa-langkahstrategis-perkuat-hubungan-bilateralindonesia-korea-ke-tahap-yang-lebihtinggi>.
- Dwi Hermawan. 2023. “Perkuat Kerjasama Indonesia-Korea, UNNES dan Pukyong National University Gelar FGD Bersama 17 PTN.” [unnes.ac.id](https://unnes.ac.id/perkuat-kerjasama-indonesia-korea-unnes-dan-pukyong-national-university-gelar-fgd-bersama-17-ptn/). <https://unnes.ac.id/perkuat-kerjasama-indonesia-korea-unnes-dan-pukyong-national-university-gelar-fgd-bersama-17-ptn/>.
- Eric J. Ballbach. 2023. “South Korea's Evolving Indo - Pacific Strategy.” SWP Research Paper.

https://www.swp-berlin.org/publication/products/research_pappers/2023R02_SouthKorea_IndoPacificStrategy.pdf.

Gindarsah. 2015. “Indonesia’s Defence Diplomacy: Harnessing the Hedging Strategy Against Regional Uncertainties (RSIS Working Paper No. 293).” S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS). <https://www.rsis.edu.sg/wpcontent/uploads/2015/06/WP293.pdf>.

Andy, Purnama. 2021. “Kerjasama Industri Pertahanan Indonesia–Korea Selatan: Peluang dan Tantangan.” Working Paper. <https://media.neliti.com/media/publications/562609-kerjasama-industri-pertahanan-indonesia-e87b07fc.pdf>.

Hardiyanti, Rima. 2019. “Peran Korea Selatan dalam Kerja Sama Pertahanan dengan Indonesia Tahun 2010–2017.” *Global Political Studies (GPS)* 2 (2): 107-117. <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/gps/article/view/1997/1343>.

Hidriyah S. 2017. “Penguatan Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Korea Selatan.” Vol. IX. 6 vols. N.p.: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

HUMAS KEMENTERIAN PUPR/UN. 2022. “Empat Fokus Kerja Sama Indonesia - Korea Selatan dalam pembangunan Insfrakstruktur.” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Empat Fokus Kerja Sama Indonesia – Korea Selatan dalam Pembangunan Infrastruktur Read more. <https://setkab.go.id/empat-fokus-kerja-sama-indonesia-korea-selatan-dalam-pembangunan-infrastruktur/>.

Humas Otorita Ibu Kota Nusantara. 2023. “Delegasi Korea Selatan Jajak Kerjasama dengan Otorita IKN.” IKN. IKN.

<https://www.ikn.go.id/delegasi-korea-selatan-jajak-kerjasama-dengan-otorita-ikn>.

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2019. “Disaksikan Presiden Jokowi dan Presiden Moon, Indonesia dan Korsel Tanda Tangan 3 Kerja Sama Read more:.”

<https://setkab.go.id/disaksikan-presiden-jokowi-dan-presiden-moon-indonesia-dan-korsel-tandatangani-3-kerja-sama/>.”

<https://setkab.go.id/disaksikan-presiden-jokowi-dan-presiden-moon-indonesia-dan-korsel-tandatangani-3-kerja-sama/>.

Jaehyon Lee. 2019. “Asan Institute for Policy Studies.” Korea’s New Southern Policy: Motivations of ‘Peace Cooperation’ and Implications for the Korean Peninsula.” . <http://www.jstor.com/stable/resrep20678>.

Karim, Moch Faisal. “Middle Power, Status-Seeking, and Role Conceptions: The Cases of Indonesia and South Korea.” *Australian Journal of International Affairs*, 2018. Accessed via Warwick Research Archive: <http://wrap.warwick.ac.uk/99122>.

Kedutaan Besar Republik Indonesia Seoul. 2017. “Perancang Indonesia di Pekan Kode Korea.” <http://kbriseoul.kr/kbriseoul/>. <http://kbriseoul.kr/kbriseoul/index.php/id/2013-01-21-22-49-05/berita-terkini/639-perancang-indonesia-di-pekan-mode-korea>.

Kementerian Investasi/BKPM. 2022. “Investasi Hyundai di Indonesia Terbesar se-Asia Tenggara.” Kementerian Investasi/BKPM. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/investasi-hyundai-di-indonesia-terbesar-se-asia-tenggara>.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2023. “Peringati 50 Tahun Hubungan Indonesia dan Korea Selatan, Menko Airlangga Tekankan Kerja Sama Ekonomi Digital bagi Pengembangan UMKM.”
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5518/peringati-50-tahun-hubungan-indonesia-dan-korea-selatan-menko-airlangga-tekankan-kerja-sama-ekonomi-digital-bagi-pengembangan-umkm>.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2019. “Menko Airlangga dampingi Presiden RI ke Korsel, Sejumlah Kerja sama Ekonomi Di sepakati.”
<https://ekon.go.id/publikasi/detail/5/menko-airlangga-dampingi-presiden-ri-ke-korsel-sejumlah-kerja-sama-ekonomi-disepakati>.

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. 2023. “Menpora Dito Minta Program Pertukaran Pemuda Indonesia-Korea Dimanfaatkan Jadi Wadah Jejaring Pengembangan Diri.”
<https://www.kemenpora.go.id/detail/4161/menpora-dito-minta-program-pertukaran-pemuda-indonesia-korea-dimanfaatkan-jadi-wadah-jejaring-pengembangan-diri>.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2018. “Presiden Jokowi Target Perdagangan RI-Korsel Tembus 30 Miliar Dollar AS.”
https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari-istana/presiden-jokowi-target-perdagangan-ri-korsel-tembus-30-miliar-dollar-as?utm_source=.

Kementerian Perdagangan. 2020. "Indonesia–Korea CEPA: Tonggak Baru Hubungan Ekonomi Bilateral Kedua Negara." Kementerian Perdagangan. https://www.kemendag.go.id/storage/article_uploads/y6gvyceDAkZhlGDHnFkJWR3YKZ6jVcr0EoEuDOB5.pdf.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2022. "Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan RI." Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan RI. <https://www.kemhan.go.id/strahan/2022/10/29/perkuat-kerja-sama-pertahanan-the-2nd-22-som-menjadi-wujud-komitmen-indonesia-sebagai-special-strategic-partnership-korea-selatan.html>.

Kementrian Keuangan Direktorat Bea Cukai. 2023. "IK-CEPA Resmi Diimplementasikan, Pahami Ketentuan Bea Masuk Barang dari Korea." <https://www.beacukai.go.id/berita/ik-cepa-resmi-diimplementasikan-pahami-ketentuan-bea-masuk-barang-dari-korea.html>.

Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investigasi. 2023. "Rapat tindak lanjut hasil pertemuan : high level dialogue on Investment antara Indonesia dan Korea Selatan Membahas kerjasama dan Investasi." <https://maritim.go.id/detail/rapat-tindak-lanjut-hasil-pertemuan-high-level-dialogue-on-investment-antara-indonesia-dan-korea-selatan-membahas-kerjasama-dan-investasi>.

Kenzie Sultan Ryvantya. 2024. "Indonesia-South Korea Security Cooperation: Progress, Problems, and Possibilities in Defence Diplomacy." 9:no. 1 (Juni).
file:///C:/Users/User/Downloads/4.+Final+Indonesia-South+Korea+Securi

ty+Cooperation+Progress,+Problems,+and+Possibilities+in+Defence+Diplomacy.pdf.

Kim Sooyeon. 2019. “(LEAD) S. Korea, Indonesia agree to boost ties on infrastructure, economy.” *Yonhap News Agency*, November 25, 2019. <https://en.yna.co.kr/view/AEN20191125006251315>.

KOCIS. 2011. “Korean Culture and Information Service.” 문화체육관광부 한국문화홍보서비스. <https://www.kocis.go.kr/>.

KOCIS. 2019. “[이제는 아세안 ⑩] 신남방 첫 결실, 인도네시아 (ASEAN (Indonesia yang pertama di New South)).” <https://www.kocis.go.kr/koreanet/view.do?seq=1033967>

KOCIS. 2021. “문 대통령 “차세대 전투기 공동개발, 한-인니 신뢰 상징” Moon Jae In : “Pengembangan bersama jet tempur generasi berikutnya merupakan simbol kepercayaan antara Korea Selatan dan Indonesia.”” <https://www.kocis.go.kr/koreanet/view.do?seq=1037692&searchType=menu0026&langCode=lang001&ctrCode=&RN=1>.

Korea Foundation. 2018. “Foundation Activities.” Korea Foundation (한국국제교류재단). <http://en.of.or.kr/?menuno=3767&kflnbindex>.

Ko Sung Bin. n.d. n.d. "South Korea's Search for an Independent Foreign Policy." *Journal of Contemporary Asia* 36:258-273.
<https://doi.org/10.1080/00472330680000151>.

KSIF. 2018. "세계 곳곳 세종학당." 세종학당재단.
<https://www.ksif.or.kr/ste/ksf/hkd/lochkd.do?menu>.

Lee, Sang H. 2014. "The Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative (NAPCI): A Vision toward Sustainable Peace and Cooperation in Northeast Asia." The Asan Forum.
<https://theasanforum.org/the-northeast-asia-peace-and-cooperation-initiative-napci-a-vision-toward-sustainable-peace-and-cooperation-in-northeast-asia/>.

Lee Jaehyon. 2019. "Kebijakan Selatan Baru Korea: Motivasi 'Kerja Sama Perdamaian' dan Implikasinya bagi Semenanjung Korea." The Asian Institute for Policy Studies.
https://en-asaninst-org.translate.googleusercontent.com/contents/koreas-new-southern-policy-motivations-of-peace-cooperation-and-implications-for-the-korean-peninsula/?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=Kerja%20sama%20ini%20tidak%20men.

Marina Ika Sari. 2021. "Mendorong Proses Renegosiasi antara Indonesia-Korea Selatan." Mendorong Proses Renegosiasi antara Indonesia-Korea Selatan Indonesia Defense Magazine.
https://www.habibiecenter.or.id/contain-news-Mendorong-Proses-Renegosiasi-antara-Indonesia-Korea-Selatan_160.

Ministry of External Affairs, India, Bilateral/Multilateral. n.d. "India and Republic of Korea: A Vision for People, Prosperity, Peace and our Future." Accessed 2018. http://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/30041/India_and_Republic_of_Korea_A_Vision_for_People_Prosperty_Peace_and_our_Future.

Ministry Of Foreign Affairs. 2022. "Korea's Key Diplomatic Tasks." <https://www.mofa.go.kr/eng/>. https://www.mofa.go.kr/eng/wpge/m_5727/contents.do.

Ministry of Foreign Affairs 2019. "Konferensi Tingkat Tinggi Korea Selatan-Indonesia." https://www.mofa.go.kr/www/brd/m_4076/view.do?seq=368452&page=283.

Moch Faisal Karim, "Middle Power, Status-Seeking, and Role Conceptions: The Cases of Indonesia and South Korea," *Australian Journal of International Affairs* (2018)

Moe Thuzar. 2021. *The New Southern Policy Plus: What's New and What's Next?* Vol. 11. 12 vols.:N.p.: World Economy Brief.

2019. "Konferensi Tingkat Tinggi Korea Selatan-Indonesia." https://www.mofa.go.kr/www/brd/m_4076/view.do?seq=368452&page=283.

Muhammad Taqy Dwi Putra. 2024. "Kerja Sama Korea Selatan Dengan Indonesia Dalam Penerapan New Southern Policy IK-CEPA Bidang Ekonomi." 1:4. file:///C:/Users/User/Downloads/jurnal+taqy.pdf.

Nadkarni, Vidya. 2010. *Strategic Partnerships in Asia: Balancing Without Alliances*. N.p.: Routledge.

Noto Sueneto. 2021. "South Korea's New Southern Policy: The Indonesia Dimension." *The Diplomat – Asia-Pacific Current Affairs Magazine*. <https://thediplomat.com/2021/06/south-koreas-new-southern-policy-the-indonesia-dimension/>.

Nurw. 2021. "DEFENSE STUDIES FOCUS ON DEFENSE CAPABILITY DEVELOPMENT IN SOUTHEAST ASIA AND OCEANIA." *Indonesia-Korsel Lanjutkan Kerja Sama* (April). https://defense-studies.blogspot.com/2021/04/indonesia-korsel-lanjutkan-kerja-sama.html?utm_source=chatgpt.com.

Park, Soyen and Ramandeep Singh. 2018. "South Korea's "New Southern Policy" Reaches the Shores of India." *The Diplomat – Asia-Pacific Current Affairs Magazine*. <https://thediplomat.com/2018/07/south-koreas-new-southern-policy-reaches-the-shores-of-india/>.

Presidential Committee on New Southern Policy. 2020. "New Southern Policy Plus." *New Southern Policy Plus: Progress and vision for peace and prosperity with ASEAN and India* 1. https://assets.korearisk.com/uploads/2023/02/New-Southern-Policy-NSP-Plus_Policy-Statement.pdf?utm_source=.

Republika. 2016. "Menjaring Investasi Korea Selatan." <http://www.republika.co.id/berita/koran/pareto/16/01/04/o0ezc829-menjaring-investasi-koreaselatan>.

Rini Afrianti & Cindy Yosita Putri. 2017. “Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dalam Pengembangan Sektor Industri Kreatif di Indonesia.” 1 (December): 62.

<https://journal.unpas.ac.id/index.php/transborders/article/view/754/433>.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “Empat Fokus Kerja Sama Indonesia – Korea Selatan dalam Pembangunan Infrastruktur.” 29 Juli 2022.

<https://setkab.go.id/empat-fokus-kerja-sama-indonesia-korea-selatan-dalam-pembangunan-infrastruktur/> Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. “Empat Fokus Kerja Sama Indonesia – Korea Selatan dalam Pembangunan Infrastruktur.” 29 Juli 2022.

<https://setkab.go.id/empat-fokus-kerja-sama-indonesia-korea-selatan-dalam-pembangunan-infrastruktur/>

Sea Young (Sarah), Kim. 2022. “Growing Ties with Indonesia: A First Look at South Korea's Indo-Pacific Strategy.” *Korea Economic Institute*, August 30, 2022.

https://keia.org/the-peninsula/growing-ties-with-indonesia-a-first-look-at-south-koreas-indo-pacific-strategy/?utm_source=.

Septiari D. 2019. “It's a wrap: Indonesia, South Korea announce completion of CEPA negotiations.” (November).

[https://www.thejakartapost.com/ne](https://www.thejakartapost.com/news/2019/11/25/its-a-wrap-indonesia-south-korea-announce-completion-of-cepa-negotiations.html)

[ws/2019/11/25/its-a-wrap-indonesia-south-korea-announce-completion-of-cepa-negotiations.html](https://www.thejakartapost.com/news/2019/11/25/its-a-wrap-indonesia-south-korea-announce-completion-of-cepa-negotiations.html).

Sohn Jiae. 2017. "President Moon unveils New Southern Policy for ASEAN : Korea.net : The official website of the Republic of Korea." Korea.net, November 10, 2017. <https://www.korea.net/NewsFocus/policies/view?articleId=151092>.

Suoneto. 2021. "South Korea's New Southern Policy: The Indonesia Dimension." *The Diplomat – Asia-Pacific Current Affairs Magazine*. <https://thediplomat.com/2021/06/southkoreas-new-southern-policy-theindonesia-dimension/>.

Tuyserkani, Tiesheyar ai. 2020. "Central Asia between the South Korean Eurasia Initiative and the China Belt and Road Initiative." *Institute for Political and International Studies* (Juni).

VOI. 2020. "IK-CEPA Is Officially Signed, Indonesia-South Korea Strengthens Trade Relations." (December). <https://voi.id/en/news/23526/ikcepa-is-officially-signed-indonesiasouth-korea-strengthens-traderelations>.

Yonhap News Agency. 2017. "Joint statement of leaders of S. Korea, Indonesia." November 09, 2017. https://en.yna.co.kr/view/AEN20171109012500315?utm_source=.

Yose Rizal Damuri, *RCEP and Indonesia: Economic Reform and Prospects for Implementation* (Jakarta: Economic Research Institute for ASEAN and East Asia [ERIA], 2023), <https://www.eria.org/uploads/media/discussion-papers/FY22/RCEP-and-Indonesia-Economic-Reform-and-Prospects-for-Implementation-.pdf>.

